



**Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Cirebon**

# **RENJA PERUBAHAN**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**



## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| DAFTAR ISI.....  | i   |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1   |
| 1.1. Latar Belakang.....   | 1   |
| 1.2. Landasan Hukum .....  | 4   |
| 1.3. Maksud Dan Tujuan.....  | 7   |
| Maksudnya adalah : .....   | 7   |
| Tujuannya adalah : .....   | 7   |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....   | 7   |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN<br>CIREBON TAHUN 2024.....  | 8   |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Capaian<br>Renstra 2019-2024.....  | 8   |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat DLH.....   | 15  |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi DLH .....  | 22  |
| <b>2.3.1. Permasalahan Dan Hambatan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi:</b> .....  | 22  |
| <b>2.3.2. Dampak Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Terhadap<br/>        Capaian Program Nasional/Internasional</b> .....   | 24  |
| 2.3.2.1. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Terpilih.....  | 24  |
| <b>2.3.2.2. Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b> .....  | 25  |
| 2.3.2.3. Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat .....   | 27  |
| <b>2.3.3. Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat<br/>        Daerah</b> 27   | 27  |
| 2.3.3.1. Tantangan : .....   | 27  |
| 2.3.3.2. Peluang :.....  | 28  |
| <b>2.3.4. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi Dan Catatan Yang<br/>        Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program Dan Kegiatan<br/>        Prioritas Tahun Yang Direncanakan</b> ..... | 29  |
| 2.3.4.1. Non Urusan .....  | 29  |
| 2.3.4.2. Urusan Wajib Lingkungan Hidup .....   | 30  |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD.....   | 34  |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat .....   | 60  |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....  | 85  |
| 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....   | 85  |
| <b>3.1.1. Rencana Kerja Pemerintah (Rkp) Tahun 2025</b> .....  | 85  |
| <b>3.1.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals<br/>        (Tpb/SDGs)</b> .....  | 86  |
| 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja DLH Tahun 2024.....  | 87  |
| 3.3. Program Dan Kegiatan .....  | 91  |
| <b>3.3.1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan</b> .....  | 91  |
| <b>3.3.1.1. Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah</b> .....   | 91  |
| <b>3.3.1.2. Perubahan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan</b> .....  | 92  |
| <b>3.3.2. Rekapitulasi Program, Kegiatan, Dan Subkegiatan</b> .....  | 93  |
| <b>3.3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan</b> .....  | 96  |
| BAB IV. PENUTUP.....   | 117 |
| .....  |     |

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

**NOMOR** :

**TANGGAL** :

**TENTANG** : Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Cirebon Tahun 2024

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Perubahan Dinas Lingkungan Hidup ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD);
2. Renja Perubahan merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2024;
3. Renja Perubahan SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Perangkat Daerah pada tahun 2024.

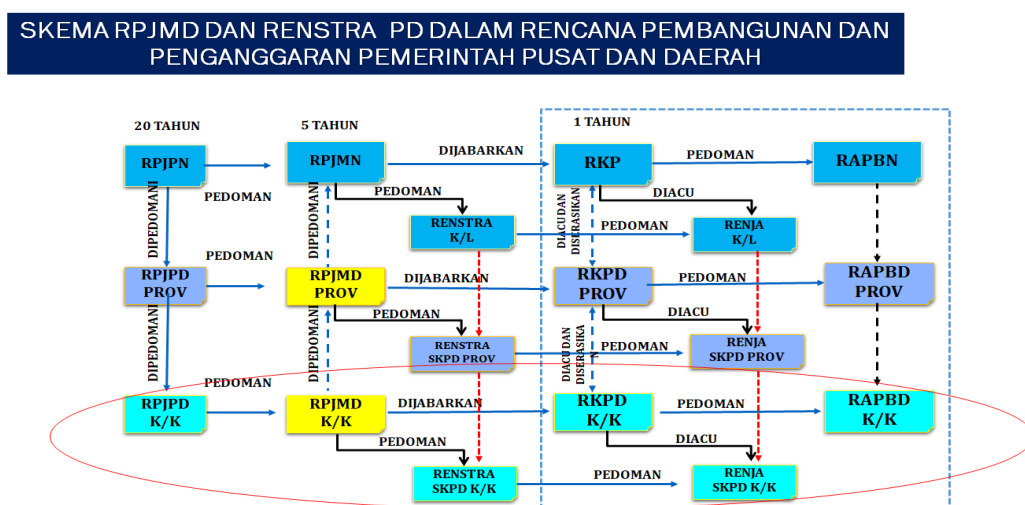
Mengingat arti strategis Dokumen Rencana Perubahan SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Rencana SKPD harus Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2024.

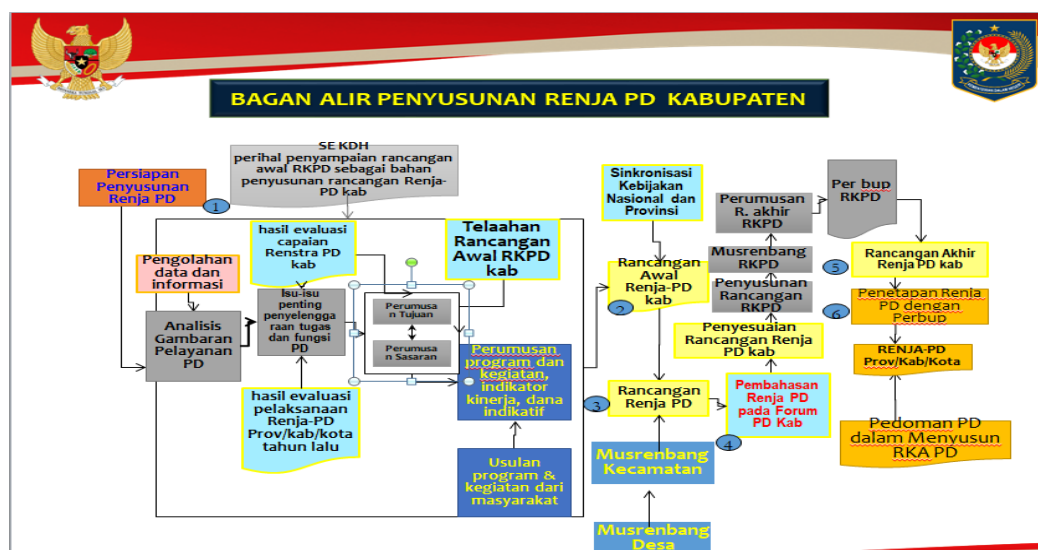
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenan.

Skema penyusunan perencanaan perangkat daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1



Gambar 2





## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon;
30. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
31. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
32. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 000.7.2.4/9/Bapelitbangda tentang Tahapan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan renja Perangkat Daerah Tahun 2024.



### 1.3. Maksud Dan Tujuan

#### MAKSUDNYA ADALAH :

Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

#### TUJUANNYA ADALAH :

Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun 2024.

### 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra DLH
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DLH
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja DLH Tahun 2024
- 3.3. Program dan Kegiatan DLH Tahun 2024

#### **BAB IV PENUTUP**

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Capaian Renstra 2019-2024

Evaluasi pelaksanaan satuan kerja perangkat daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahannya. Evaluasi dimaksudkan disusun untuk mengetahui sejauh mana satuan kerja bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan segala daya yang ada serta mengedepankan konsistensi, efisiensi, produktif dan inovatif. Selain itu juga untuk meningkatkan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan serta untuk menganalisis perencanaan kebutuhan pada tahun 2024.

Evaluasi Renja dengan cara melakukan perbandingan atau membuat sandingan data antara target capaian kinerja Renstra sesuai atau sampai dengan periode akhir Renstra, dibandingkan atau disandingkan dengan data realisasi target dan realisasi kinerja hasil program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun.

Sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan DLH pada tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan), dan Urusan Wajib Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2024 DLH mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah **Rp. 48.852.981.730,-**. Dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Program, 15 (lima belas) Kegiatan, dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 8.277.515.830,-**.

Urusan Wajib Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan melalui 8 (delapan) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 40.575.465.900,-**.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DLH s/d Tahun 2024 sampai triwulan I dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2024**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup













Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi Renstra DLH sesuai tabel 2.1. diatas, secara periodik realisasi kinerja dalam rangka target capaian kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2019-2024, masih disebut wajar sesuai pendekatan *money follow function* artinya fungsi-fungsi yang berada pada masing-masing unit/satuan kerja di DLH yang sudah dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.

Meskipun program dan kegiatan bidang Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan secara wajar, tetapi untuk mencapai target kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2019-2024 masih diperlukan upaya-upaya perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien dan efektif.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat DLH

Pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut di atas, standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup terdiri dari :

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air;
- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
- c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa;
- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.

Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjang oleh tata laksana berupa Standar Operasional Pelayanan (SOP) Dinas Lingkungan Hidup. Terdapat 5 (lima) SOP yang meliputi SOP terkait bidang kesekretariatan (umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan) dan terkait bidang teknis/pelayanan di bidang analisis pencegahan dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian

dampak lingkungan, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta pemantauan dan pemulihan. SOP yang berhubungan langsung dengan pencapaian misi daerah antara lain Prosedur Pembinaan Masyarakat Dalam Rangka Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, Prosedur Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan, Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus Lingkungan Hidup, Prosedur Pengarahan Penyusunan Dokumen AMDAL, Prosedur Pengarahan Penyusunan Dokumen dan Persetujuan Dokumen UKL-UPL, Prosedur Pelayanan Pengajuan dan Persetujuan/Rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPK-PPLH). Beberapa SOP bidang teknis lainnya secara tidak langsung juga mendukung pencapaian misi, tujuan dan sasaran daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sub urusan Persampahan mengemban tugas dan tanggungjawab serta target kinerja yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019-2024 yang diturunkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 sesuai Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci yang menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup adalah:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi dengan cara perhitungan  $IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$
- Hasil perhitungan kabupaten terhadap Indeks kualitas air (IKA)
- Hasil perhitungan kabupaten terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)
- Hasil perhitungan kabupaten terhadap Indeks Tutupan Lahan

- Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota
- Tersedianya data informasi dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota
- Ketaatan pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/Kota
- Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kabupaten/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/Kota
- Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH
- Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat
- Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani

Analisa kinerja pelayanan pada DLH diuraikan dengan pencapaian indikator kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Cirebon**

| NO  | Indikator  | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |                  |                |                  | Realisasi Capaian |                  | Proyeksi       |                  | Catatan Analisis |
|-----|--|----------------------|-----|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|     |  |                      |     | Tahun 2022 (n-2)                | Tahun 2023 (n-1) | Tahun 2024 (n) | Tahun 2025 (n+1) | Tahun 2022 (n-2)  | Tahun 2023 (n-1) | Tahun 2024 (n) | Tahun 2025 (n+1) |                  |
| (1) | (2)  | (3)                  | (4) | (5)                             | (6)              | (7)            | (8)              | (9)               | (10)             | (11)           | (12)             | (13)             |
| 1.  | Indeks Pencemaran Air  | -                    | -   | 49,02                           | 49,26            | 49,50          |                  | 48,52             | 53,20            | 49,50          |                  |                  |
|     | Indeks Kualitas Air  | -                    |     |                                 |                  |                | 72,17            |                   |                  |                | 72,17            |                  |
| 2.  | Indeks Pencemaran Udara                                      | -                    | -   | 76,72                           | 77,22            | 77,72          |                  | 81,03             | 76,13            | 77,72          |                  |                  |
|     | Indeks Kualitas Udara  | -                    |     |                                 |                  |                | 61,31            |                   |                  |                | 61,31            |                  |
| 3.  | Indeks Tutupan Lahan   | -                    | -   | 33,85                           | 33,86            | 33,87          | 50,75            | 27,56             | 27,96            | 33,87          | 50,75            |                  |
| 4.  | Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan                     | -                    | -   | 30                              | 45               | 60             |                  | 26,42             | 70,76            | 85,02          |                  |                  |
| 5.  | Persentase Pengurangan Timbulan Sampah                       | -                    | -   | 10                              | 15               | 20             |                  | 5,32              | 14,26            | 20             |                  |                  |
|     | Persentase tingkat pengelolaan persampahan Kabupaten Cirebon |                      |     |                                 |                  |                | 12               |                   |                  |                | 12               |                  |

| NO   | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK  | Target Renstra Perangkat Daerah |                  |                |                  | Realisasi Capaian |                  | Proyeksi       |                  | Catatan Analisis  |
|------|-----------|----------------------|--|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---|
|      |           |                      |  | Tahun 2022 (n-2)                | Tahun 2023 (n-1) | Tahun 2024 (n) | Tahun 2025 (n+1) | Tahun 2022 (n-2)  | Tahun 2023 (n-1) | Tahun 2024 (n) | Tahun 2025 (n+1) |   |
| (1)  | (2)       | (3)                  | (4)  | (5)                             | (6)              | (7)            | (8)              | (9)               | (10)             | (11)           | (12)             | (13)  |
| 6.   |           | -                    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi dengan cara perhitungan IKLH = $(0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$ | 51,26                           | 51,49            | 51,71          | 63,08            | 57,09             | 56,96            | 51,71          | 63,08            | Rumus IKK belum dijadikan sebagai indikator kinerja Program dan |
| 7.   |           | -                    | Hasil perhitungan kabupaten terhadap Indeks kualitas air (IKA)   | 49,02                           | 49,26            | 49,50          | 72,17            | 48,52             | 53,20            | 49,50          | 72,17            |   |
| 8.   |           | -                    | Hasil perhitungan kabupaten terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)   | 76,72                           | 77,22            | 77,72          | 61,31            | 81,03             | 76,13            | 77,72          | 61,31            |   |
| 9.   |           | -                    | Hasil perhitungan kabupaten terhadap Indeks Tutupan Lahan  | 33,85                           | 33,86            | 33,87          | 50,75            | 27,56             | 27,96            | 33,87          | 50,75            |   |
| .11. |           | -                    | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota   | -                               | -                | 20             | 12               | 30,32             | 11,54            | 20             | 12               | Rumus IKK belum dijadikan sebagai indikator kinerja Program dan |
| 12.  |           | -                    | Tersedianya data informasi dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota   | -                               | -                | 20             | 12               | 0                 | 11,54            | 20             | 12               | Kegiatan  |

| NO  | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK  | Target Renstra Perangkat Daerah |                  |                |                  | Realisasi Capaian |                  | Proyeksi       |                  | Catatan Analisis |
|-----|-----------|----------------------|--|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|     |           |                      |  | Tahun 2022 (n-2)                | Tahun 2023 (n-1) | Tahun 2024 (n) | Tahun 2025 (n+1) | Tahun 2022 (n-2)  | Tahun 2023 (n-1) | Tahun 2024 (n) | Tahun 2025 (n+1) |                  |
| (1) | (2)       | (3)                  | (4)  | (5)                             | (6)              | (7)            | (8)              | (9)               | (10)             | (11)           | (12)             | (13)             |
| 13. |           | -                    | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                | -                               | -                | -              | -                | 46,91             | 47,87            | -              | -                |                  |
| 14. |           | -                    | Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/Kota   | -                               | -                | -              | -                | 100               | 100              | -              | -                |                  |
| 15. |           | -                    | Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kabupaten/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/Kota | -                               | -                | -              | -                | 0                 | 0                | -              | -                |                  |
| 16. |           | -                    | Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH  | -                               | -                | -              | -                | 0                 | 0                | -              | -                |                  |
| 17. |           | -                    | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat  | -                               | -                | -              | -                | 0                 | 0                | -              | -                |                  |

| NO  | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK   | Target Renstra Perangkat Daerah |                  |                |                  | Realisasi Capaian |                  | Proyeksi       |                  | Catatan Analisis |
|-----|-----------|----------------------|---|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|     |           |                      |   | Tahun 2022 (n-2)                | Tahun 2023 (n-1) | Tahun 2024 (n) | Tahun 2025 (n+1) | Tahun 2022 (n-2)  | Tahun 2023 (n-1) | Tahun 2024 (n) | Tahun 2025 (n+1) |                  |
| (1) | (2)       | (3)                  | (4)   | (5)                             | (6)              | (7)            | (8)              | (9)               | (10)             | (11)           | (12)             | (13)             |
| 18. |           | -                    | Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani | -                               | -                | -              | -                | 100               | 100              | -              | -                |                  |

## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi DLH

### 2.3.1. Permasalahan Dan Hambatan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi:

Permasalahan dan hambatan yang tidak dikelola dan dicari solusinya dapat menghambat capaian program nasional/internasional seperti NSPK dan SDGs (suistanable Development Goals).

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain:

#### 1. Degradasi Lahan, Sungai dan Lautan;

Restorasi lahan mengandung arti sebagai rehabilitasi lahan agar dapat dikembalikan kepada kondisi awalnya sebelum mengalami degradasi. Bentuk degradasi lahan juga bisa berakibat fatal dan tidak mungkin diperbaiki, dan salah satu contoh degradasi yang bersifat permanen adalah punahnya suatu species tertentu. Pada prakteknya dalam kondisi tertentu bilamana kondisi lahan yang mengalami degradasi terlalu berat sehingga perkiraan biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan dengan tingkat pengembalian yang akan diperoleh tidak memadai seringkali dilakukan rehabilitasi hanya sampai tingkat tujuan perbaikan tertentu saja. Bahkan tidak jarang sebagian lahan terdegradasi sering hanya ditinggalkan atau diterlantarkan begitu saja untuk jangka waktu yang cukup lama. Kemudian setelah jangka waktu tertentu lahan yang ditinggalkan tadi direhabilitasi agar dapat digunakan untuk pemanfaatan yang cukup sederhana, namun tidak sampai kepada kondisi semula jika teknik, dana dan motivasi tidak mendukung, hal demikian dikenal dengan istilah reklamasi lahan.

Selain tingginya potensi erosi, degradasi sungai dan laut (muara) juga disebabkan pembuangan limbah industri langsung masuk ke perairan sungai tanpa melalui pengolahan. Isu pencemaran air sungai yang menjadi sorotan banyak pihak yakni pembuangan limbah industri batu alam. Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks karena selain penurunan kualitas perairan dan pendangkalan sungai juga mengakibatkan penurunan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.

#### 2. Kelangkaan Sumber Air Baku;

Kelangkaan air atau krisis air atau kekurangan air adalah kekurangan sumber air yang memadai yang dapat memenuhi kebutuhan air untuk



wilayah tertentu. Setiap kali ada kekurangan akses ke air minum dan air segar untuk minum dan sanitasi, situasinya berarti bahwa airnya langka. Kelangkaan air berkaitan dengan situasi di mana ada kekurangan air, krisis air, dan kurangnya akses ke air berkualitas.

### 3. Kerusakan Daerah Muara dan Pesisir;

Sebagai kawasan yang strategis dan memiliki potensi yang sangat besar, daerah pesisir di Kabupaten Cirebon memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, terutama masyarakat yang bermukim di sepanjang wilayah pesisir tersebut. Pemanfaatan potensi wilayah pesisir oleh menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dari waktu ke waktu, baik oleh masyarakat maupun pemanfaatan untuk kepentingan pembangunan. Terdapat kecenderungan pemanfaatan potensi wilayah pesisir tidak lagi sesuai dengan daya dukung dan azas pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan daerah pesisir pada prinsipnya berkaitan erat dengan faktor ekologis, ekonomi dan sosial yang saling berhubungan satu sama lain. Timbulnya masalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan daerah pesisir antara lain karena ketiga faktor tersebut tidak berjalan secara serasi dan seimbang. Aktivitas ekonomi dan non-ekonomi masyarakat pesisir di kawasan pesisir Kabupaten Cirebon memberikan dampak terhadap ekosistem masyarakat pesisir. Dampak yang paling nyata di kawasan pesisir dengan eksploitasi sumberdaya adalah degradasi kondisi bio-fisik sumber daya pesisir. Sepanjang daerah di kawasan pesisir Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat terjadi abrasi air laut, yang berarti pula terjadi sedimentasi dan penurunan luasan vegetasi pantai.

### 4. Kurangnya Pengawasan Tata Ruang Wilayah

Beberapa tahun terakhir di Kabupaten Cirebon telah terjadi peningkatan pembangunan yang sangat pesat. Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah dengan PDRB andalannya dari sektor perdagangan dan jasa sehingga banyak dilakukan pembangunan pusat perdagangan dan industri serta perumahan. Dengan adanya pembangunan yang semakin meningkat di Kabupaten Cirebon, dikhawatirkan banyak mengorbankan lahan produktif maupun kawasan ruang terbuka hijau yang dikorbankan. Di sisi lain, pesatnya pembangunan industri di Kabupaten Cirebon menyebabkan terjadinya peningkatan pencemaran dan menimbulkan

penurunan kualitas udara ambien, air tanah dan perairan sungai dan muara (laut).

#### 5. Masih Kurangnya Pengelolaan Sampah

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon setiap tahunnya, maka harus diimbangi pula dengan penanganan sistem pengelolaan sampah yang baik dan benar, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 serta Permen PU nomor 03/PRT/M/2013. Selain itu perilaku masyarakat yang masih belum sepenuhnya menciptakan kebersihan lingkungan sehingga masih membuang sampah di sembarang tempat. Sistem pengelolaan persampahan ini harus terkoordinasi dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun dari pihak lain yang terlibat, seperti pihak swasta.

### **2.3.2. Dampak Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional**

#### **2.3.2.1. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Terpilih**

Berdasarkan pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2019 – 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2020 – 2024. Visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024 adalah "Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman". Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) misi. Pada salah satu misi yakni misi ke 4 (MAJU)"Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah" mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

Tujuan dari misi ke 4 tersebut adalah : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Adapun sasaran pada tujuan tersebut yang

berkaitan dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup terutama adalah pada sasaran keempat yakni Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Menyusun rencana pelaksanaan dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan; Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Rencana tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional kegiatan perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, ditetapkan 34 (tiga puluh empat) strategi umum yang salah satunya adalah meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan dimasukkannya peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai salah satu strategi umum, maka masalah lingkungan hidup harus menjadi program atau kebijakan prioritas dalam seluruh kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Cirebon. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi misi serta tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon.

#### 2.3.2.2. Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengingat bahwa wilayah Kabupaten Cirebon merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah kabupaten sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala kabupaten. Dan bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam Renstra Tahun 2020-2024 telah menjabarkan prioritas pembangunan bidang serta sasaran

bidang yang terkait dengan pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Adapun program prioritas tersebut yang sesuai dengan sektor kehutanan adalah:

- a. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
- b. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
- c. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
- d. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas 63 Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

### 2.3.2.3. Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

Selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat merumuskan visi untuk memberikan pelayanan berupa “Terwujudnya Jabar Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”, dengan misi 3 Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan tujuan dan sasaran pelayanan yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Tujuan yang telah ditetapkan adalah termasuk tujuan 2 yaitu Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatnya pengendalian dampak perubahan iklim;
3. Meningkatkan ketersediaan air untuk menjangkau produktifitas ekonomi dan domestik;
4. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.

### 2.3.3. Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang DLH Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan Visi dan Misinya adalah :

#### 2.3.3.1. Tantangan :

- a. Penurunan kuantitas dan kualitas air;
- b. Penurunan kualitas udara dan tanah;
- c. Belum optimalnya pengelolaan air limbah;
- d. Meningkatnya pencemaran di badan air/sungai akibat limbah domestik, kegiatan industri, kegiatan pariwisata dan lain-lain;
- e. Adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian;

- f. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, mata air dan sungai);
- g. Belum adanya PPNS dan PPLH untuk menghadapi permasalahan dalam melakukan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon;
- h. Tidak sebandingnya antara keterbatasan sumber daya yang ada dengan luasnya wilayah pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
- i. Cakupan layanan persampahan dan pengelolaan masih rendah;
- j. Menurunnya Kapasitas TPA.

---

#### 2.3.3.2. Peluang :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- c. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. Urusan Lingkungan Hidup menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan sektoral daerah Kabupaten Cirebon dengan Indikator Kinerja Sasaran daerahnya “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”;
- e. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan DPRD dalam program penanganan sampah berupa dukungan anggaran dalam pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana dan biaya operasional pengangkutan sampah
- f. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar sektor dan lintas daerah, pelaku usaha/kegiatan, serta LSM dan Perguruan Tinggi;
- g. Bertambahnya Sumber Daya Manusia yang kompeten baik itu PNS maupun PPPK dalam hal pemahaman peraturan, pengetahuan teknis lingkungan hidup akan memudahkan peningkatan pengawasan yang maksimal dan ketaatan para pelaku usaha;
- h. Adanya sistem informasi pelaporan lingkungan hidup (SIMPEL) dari KLHK sebagai sarana pelaporan online yang mendorong peran serta

masyarakat dalam melaporkan para pelanggar dan perusak lingkungan hidup dan hutan.

#### **2.3.4. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi Dan Catatan Yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun Yang Direncanakan**

##### **2.3.4.1. Non Urusan**

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup melakukan solusi-solusi sebagai berikut :

- (1) Menyusun dan menerapkan manajemen sarana dan prasarana organisasi. Agar perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penataan fasilitas dan infrastruktur tepat guna dan tepat sasaran;
- (2) Memperkuat kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dari berbagai aspek, sehingga hasil kerja dapat terukur dan terlihat. Diharapkan dengan demikian akan menghapus pandangan negatif/kurang baik yang sudah melekat selama ini;
- (3) Membangun komitmen serta persepsi pegawai terhadap target kinerja yang akan dicapai dengan menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil, menetapkan ukuran keberhasilan yang menggambarkan derajat ketercapaian tujuan/sasaran, menetapkan aktivitas (program dan kegiatan) yang berdampak bagi pencapaian tujuan/sasaran, dan menetapkan alokasi anggaran program/kegiatan yang selaras dengan tujuan/sasaran;
- (4) Meningkatkan pengembangan dan pengawasan internal SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Karena hal ini merupakan salah satu cara organisasi untuk sukses meraih target kerja yang sudah direncanakan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah: dimulai dengan *identifikasi keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi* yang diperlukan pegawai untuk mendukung goal organisasi jangka pendek dan jangka panjang. Rencana pengembangan pegawai dengan kebutuhan organisasi harus selaras. Dalam proses identifikasi tersebut pimpinan *melakukan*

*diskusi dan tatap muka secara langsung* dengan masing-masing pegawai untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa goal karir mereka dan bagaimana mereka berpikir untuk dapat mencapainya. Langkah ketiga *menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan* pegawai sesuai dengan goal karir mereka dalam mendukung goal organisasi jangka pendek dan jangka panjang. Berikutnya *membuat action plan* program pengembangan kemampuan pegawai yang akan dilakukan. Apakah pelatihan formal, bekerja sama dengan para ahli, coaching, atau kunjungan ke lembaga lain untuk mengevaluasi atau membandingkan sesuatu dengan standar atau aturan yang berlaku. Langkah terakhir yang dilakukan adalah *menerapkan skill baru* yang didapatkan dari program pengembangan kemampuan tersebut dalam pekerjaan untuk dapat dilihat progress yang dicapai.

- (5) Menyusun kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung terhadap keberlangsungan tugas dan fungsi Lingkungan Hidup.

---

#### 2.3.4.2. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Perumusan Isu Masalah Bidang Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.3.3 Perumusan Isu Masalah Bidang Lingkungan Hidup**

| NO  | MASALAH POKOK<br><i>Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran</i> | PERMASALAHAN<br><i>Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi</i> | AKAR MASALAH<br><i>Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum</i> | PERUMUSAN ISU                         |   |
|-----|--|---|--|---------------------------------------|---|
|     |  |   |  | ISU terkait PERMASALAHAN              | ISU POKOK (PENGELOMPOKKAN ISU)                |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                                   | (6)   |
| 1   | Penanganan kualitas air baku belum optimal   | Target pemantauan kualitas air cenderung fluktuatif karena masalah jumlah sumur pantau  | Sumur pantau yang tertutup bangunan atau berubah karena adanya pembangunan fisik   | Dampak perkembangan wilayah           | Perkembangan wilayah yang tidak terantisipasi |
|     |  | Adanya pencemaran air baku pada lokasi sumur pantau   | Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan dampak terhadap air baku di sekitar lokasi sumur pantau  | Dampak perkembangan wilayah           | Perkembangan wilayah yang tidak terantisipasi |
| 2   | Penanganan kualitas udara belum optimal  | Penurunan realisasi pemantauan kualitas udara karena pelaksanaan pemantauan terkendala aspek teknis   | Keterbatasan perangkat pemantauan kualitas udara   | Ketersediaan perangkat                | Tata Kelola                                   |
|     |  | Target IKU yang fluktuatif dan cenderung berkurang  | Tidak ada perencanaan yang terukur terkait penanganan masalah kualitas udara   | Perencanaan penanganan kualitas udara | Tata Kelola                                   |
| 3   | Upaya konservasi lahan untuk mendukung peningkatan tutupan lahan yang tidak optimal  | Pembangunan wilayah menyebabkan konversi lahan  | Kegiatan pemanfaatan ruang seiring dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan wilayah   | Dampak perkembangan wilayah           | Perkembangan wilayah yang tidak terantisipasi |
| 4   | Pengelolaan persampahan tidak optimal dalam menambah cakupan layanan persampahan   | Adanya penurunan capaian akibat peningkatan pertambahan volume sampah yang tidak diimbangi kapasitas angkut dan pengelolaan di TPA                        | Perkembangan kegiatan yang menimbulkan timbulan sampah sementara aspek pengelolaan persampahan tidak turut dikembangkan  | Dampak perkembangan wilayah           | Perkembangan wilayah yang tidak terantisipasi |
|     |  | Adanya penurunan pengelolaan sampah karena unit pengelola yang tidak beroperasi maksimal akibat masalah anggaran pada masa pandemi                        |  | Tata Kelola Persampahan               | Tata kelola                                   |
| 5   | Upaya PPLH belum   | Hanya penyusunan Rencana  | Masalah penganggaran dan   | Tata kelola PPLH                      | Tata Kelola                                   |

| NO  | MASALAH POKOK<br><i>Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran</i> | PERMASALAHAN<br><i>Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi</i>  | AKAR MASALAH<br><i>Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum</i> | PERUMUSAN ISU                                  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
|     |  |  |  | ISU terkait PERMASALAHAN                       | ISU POKOK (PENGELOMPOKKAN ISU)         |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6)                                    |
|     | didukung aspek kajian/telaah terhadap program dan rencana LH   | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang dimasukkan dalam kegiatan, sementara penyelenggaraan KLHS tidak digunakan / tidak masuk dalam kegiatan   | pengaturan Tusi (tugas dan fungsi) serta tata kelola PPLH  |  | (Perencanaan, pengelolaan)             |
| 6   | Aspek kerjasama dan pelibatan stakeholder tidak optimal  | Kurangnya kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat / stakeholder terkait peringatan pencemaran lingkungan hidup sebagai bentuk mitigasi / pencegahan<br>Koordinasi serta sinkronisasi lintas sektor dalam pengendalian pencemaran dirasa tidak optimal | Aspek kerjasama dan peran serta dalam penanganan pencemaran lingkungan belum optimal direncanakan dan dikelola   | Tata kelola pengendalian pencemaran lingkungan | Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan) |
| 7   | Program KEHATI belum didukung dengan peran kelembagaan dan dukungan SDM yang memadai   | Tidak ada kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM yang berkaitan dengan program KEHATI<br>Tidak ada pengelolaan prasarana dan sarana yang terkait dengan program KEHATI  | Aspek pendukung pelaksanaan program KEHATI terkendala oleh perencanaan dan penganggaran yang terbatas  | Tata kelola pelaksanaan program KEHATI         | Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan) |
| 8   | Upaya pengendalian masalah B3 dan Limbah B3 belum optimal  | Program Pengendalian B3 dan Limbah B3 tidak digunakan  | Belum ada perencanaan terkait pengelolaan B3 / Limbah B3   | Tata kelola penanganan B3 / Limbah B3          | Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan) |
| 9   | Upaya PPLH tidak didukung oleh kapasitas SDM dan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi   | Tidak ada kegiatan pengembangan kapasitas pengawas (PPLH)<br>Tidak ada kegiatan koordinasi dan   | Aspek pendukung pelaksanaan PPLH tidak didukung oleh kapasitas SDM dan kelembagaan secara berkelanjutan  | Tata kelola penyelenggaraan pengawasan LH      | Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan) |

| NO  | MASALAH POKOK<br><i>Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran</i> | PERMASALAHAN<br><i>Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi</i>   | AKAR MASALAH<br><i>Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum</i> | PERUMUSAN ISU                                |  |
|-----|--|---|--|--|--|
|     |  |   |  | ISU terkait PERMASALAHAN                     | ISU POKOK (PENGELOMPOKKAN ISU)         |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)  | (5)  | (6)                                    |
|     |  | sinkronisasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi  |  |  |  |
| 10  | Gerakan Peduli Lingkungan Hidup menjadi tumpuan utama dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat   | Peningkatan kapasitas dan kompetensi dilakukan melalui kegiatan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup menyebabkan perlunya perencanaan Gerakan Peduli LH yang lebih komprehensif, operasional, dan tepat sasaran | -  | Perencanaan peningkatan kapasitas masyarakat | Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan) |
| 11  | Pengaduan masyarakat terkait masalah LH belum dikelola secara optimal  | Pencatatan terhadap pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya perlu dikelola dengan baik (perlu SOP terkait masalah pengaduan LH)  | -  | -  | -                                      |
| 12  | Pengelolaan persampahan belum mengakomodir kebutuhan penanganan yang berkelanjutan   | Belum ada kegiatan perencanaan pengelolaan persampahan (masterplan persampahan)   | -  | -  | -                                      |
|     |  | Belum ada upaya daur ulang / pengolahan kembali   | -  | -  | -                                      |
|     |  | Belum ada pengelolaan persampahan oleh swasta   | -  | -  | -                                      |

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD**

Hasil review terhadap rancangan Perubahan RKPD tahun 2024, dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024  
Kabupaten Cirebon

| No.     | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan   |         |         |         | Pagu Indikatif |                 | Bertambah/<br>Berkurang |               |
|---------|--|--------------------|-------------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|----------------|-----------------|-------------------------|---------------|
|         |  |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur   |         | Target  |         | Sebelum        | Sesudah         |                         |               |
|         |  |                    |                   |         |         | Sebelum  | Sesudah | Sebelum | Sesudah |                |                 |                         |               |
| 1       | 2  | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7  | 8       | 9       | 10      | 11             | 12              | 11=(11-12)              |               |
| 2.      | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar                             |                    |                   |         |         |  |         |         |         |                |                 |                         |               |
| 2.11.   | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup  |                    |                   |         |         |  |         |         |         |                |                 |                         |               |
| 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  |                    |                   |         |         |  |         |         |         |                | 8.277.515.830,- | 8.398.425.630,-         | 120.909.800,- |
|         |  |                    |                   |         |         | Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan prima (Non Kumulatif)                 | -       | 100%    | -       | -              | -               | -                       |               |
|         |  |                    |                   |         |         | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif (Non Kumulatif) | -       | 100%    | -       | -              | -               | -                       |               |
|         |  |                    |                   |         |         | Meningkatnya Pelayanan Administrasi  | -       | 100%    | -       | -              | -               | -                       |               |

| No.           | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan   |         |         |         | Pagu Indikatif |         | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------------|--|--------------------|-------------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|
|               |  |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur   |         | Target  |         | Sebelum        | Sesudah |                         |
|               |  |                    |                   |         |         | Sebelum  | Sesudah | Sebelum | Sesudah |                |         |                         |
| 1             | 2  | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7  | 8       | 9       | 10      | 11             | 12      | 11=(11-12)              |
| 2.            | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar                             |                    |                   |         |         |  |         |         |         |                |         |                         |
| 2.11.         | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup  |                    |                   |         |         |  |         |         |         |                |         |                         |
|               |  |                    |                   |         |         | Perkantoran yang sesuai standar Pelayanan Prima (Kumulatif)  |         |         |         |                |         |                         |
|               |  |                    |                   |         |         | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Kebutuhan Standar Pelayanan Prima (Kumulatif)   | -       | 100%    | -       | -              | -       | -                       |
| 2.11.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             |                    |                   |         |         | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat | -       | 1 BA    | -       | 60.621.300,-   | -       | -                       |

| No.                       | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan            | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan   |         |              |         | Pagu Indikatif  |         | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|---------|---------|--|---------|--------------|---------|-----------------|---------|-------------------------|
|                           |   |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur   |         | Target       |         | Sebelum         | Sesudah |                         |
|                           |   |                    |                   |         |         | Sebelum  | Sesudah | Sebelum      | Sesudah |                 |         |                         |
| 1                         | 2   | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7  | 8       | 9            | 10      | 11              | 12      | 11=(11-12)              |
| <b>2.</b>                 | <b>Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>                                 |                    |                   |         |         |  |         |              |         |                 |         |                         |
| <b>2.11.</b>              | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>  |                    |                   |         |         |  |         |              |         |                 |         |                         |
| 2.11.01.2.<br>01.0001.    | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah   |                    |                   |         |         | Daerah   | -       | 2<br>Dokumen | -       | 40.681.400,-    | -       | -                       |
| 2.11.01.2.<br>01.0006.    | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD |                    |                   |         |         | Jumlah<br>Laporan<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar<br>Realisasi<br>Kinerja SKPD<br>dan Laporan<br>Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar<br>Realisasi<br>Kinerja SKPD | -       | 5<br>Laporan | -       | 19.939.900,-    | -       | -                       |
| <b>2.11.01.2.<br/>02.</b> | <b>Administrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>   |                    |                   |         |         | Berita Acara<br>Reviu Internal<br>SKPD<br>terhadap<br>capaian<br>kinerja Sub<br>Kegiatan<br>pada   | -       | 1 BA         | -       | 6.723.103.030,- | -       | -                       |

| No.                    | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan         | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan  |         |                       |         | Pagu Indikatif  |         | Bertambah/<br>Berkurang |
|------------------------|--|--------------------|-------------------|---------|---------|---|---------|-----------------------|---------|-----------------|---------|-------------------------|
|                        |  |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur  |         | Target                |         | Sebelum         | Sesudah |                         |
|                        |  |                    |                   |         |         | Sebelum   | Sesudah | Sebelum               | Sesudah |                 |         |                         |
| 1                      | 2  | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7   | 8       | 9                     | 10      | 11              | 12      | 11=(11-12)              |
| 2.                     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar                                     |                    |                   |         |         |   |         |                       |         |                 |         |                         |
| 2.11.                  | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup  |                    |                   |         |         |   |         |                       |         |                 |         |                         |
|                        |  |                    |                   |         |         | Kegiatan<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah   |         |                       |         |                 |         |                         |
| 2.11.01.2.<br>02.0001. | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN  |                    |                   |         |         | Jumlah Orang<br>yang<br>Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan<br>ASN  | -       | 45<br>Orang/Bu<br>lan | -       | 6.685.151.030,- | -       | -                       |
| 2.11.01.2.<br>02.0005. | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              |                    |                   |         |         | Jumlah<br>Laporan<br>Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD | -       | 10<br>Laporan         | -       | 18.976.000,-    | -       | -                       |
| 2.11.01.2.<br>02.0007. | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran<br>SKPD |                    |                   |         |         | Jumlah<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran<br>SKPD dan<br>Laporan   | -       | 10<br>Laporan         | -       | 18.976.000,-    | -       | -                       |



| No.                    | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan  |         |          |         | Pagu Indikatif |               | Bertambah/<br>Berkurang |
|------------------------|--|--------------------|-------------------|---------|---------|---|---------|----------|---------|----------------|---------------|-------------------------|
|                        |  |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur  |         | Target   |         | Sebelum        | Sesudah       |                         |
|                        |  |                    |                   |         |         | Sebelum   | Sesudah | Sebelum  | Sesudah |                |               |                         |
| 1                      | 2  | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7   | 8       | 9        | 10      | 11             | 12            | 11=(11-12)              |
| 2.                     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar                             |                    |                   |         |         |   |         |          |         |                |               |                         |
| 2.11.                  | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup  |                    |                   |         |         |   |         |          |         |                |               |                         |
|                        |  |                    |                   |         |         | Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triw<br>ulanan/Seme<br>steran SKPD   |         |          |         |                |               |                         |
| 2.11.01.2.<br>06.      | Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah  |                    |                   |         |         | Berita Acara<br>Reviu Internal<br>SKPD<br>terhadap<br>capaian<br>kinerja Sub<br>Kegiatan<br>pada<br>Kegiatan<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | -       | 1 BA     | -       | 949.121.000,-  | -             | -                       |
| 2.11.01.2.<br>06.0001. | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerang<br>an Bangunan<br>Kantor             |                    |                   |         |         | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerang<br>an<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan  | -       | 12 Paket | -       | 12.995.200,-   | -             | -                       |
| 2.11.01.2.<br>06.0002. | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan  |                    |                   |         |         | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan   | -       | 3 Paket  | -       | 229.993.400,-  | 518.564.000,- | 288.570.600,-           |

| No.                    | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan                               |         |             |               | Pagu Indikatif |              | Bertambah/<br>Berkurang |
|------------------------|--|--------------------|-------------------|---------|---------|--|---------|-------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|
|                        |  |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur   |         | Target      |               | Sebelum        | Sesudah      |                         |
|                        |  |                    |                   |         |         | Sebelum  | Sesudah | Sebelum     | Sesudah       |                |              |                         |
| 1                      | 2  | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7  | 8       | 9           | 10            | 11             | 12           | 11=(11-12)              |
| 2.                     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar                             |                    |                   |         |         |  |         |             |               |                |              |                         |
| 2.11.                  | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup  |                    |                   |         |         |  |         |             |               |                |              |                         |
|                        | Kantor   |                    |                   |         |         | Kantor yang Disediakan   |         |             |               |                |              |                         |
| 2.11.01.2.<br>06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                    |                   |         |         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | -       | 10 Paket    | 12 Paket      | 86.157.000,-   | 71.848.000,- | (14.309.000)            |
| 2.11.01.2.<br>06.0005. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |                    |                   |         |         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | -       | 18 Paket    | 12 Paket      | 291.852.400,-  | -            | -                       |
| 2.11.01.2.<br>06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                     |                    |                   |         |         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | -       | 5 Dokumen   | 7.440 Dokumen | 100.000.000,-  | 57.429.000,- | (42.571.000)            |
| 2.11.01.2.<br>06.0007. | Penyediaan Bahan/Material  |                    |                   |         |         | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | -       | 60 Paket    | 12 Paket      | 84.756.600,-   | -            | -                       |
| 2.11.01.2.<br>06.0008. | Fasilitas Kunjungan Tamu   |                    |                   |         |         | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                      | -       | 600 Laporan | 60 Laporan    | 40.000.000,-   | -            | -                       |

| No.                       | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan    | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan  |         |                |                | Pagu Indikatif |              | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|---------|---------|---|---------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------|
|                           |   |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur  |         | Target         |                | Sebelum        | Sesudah      |                         |
|                           |   |                    |                   |         |         | Sebelum   | Sesudah | Sebelum        | Sesudah        |                |              |                         |
| 1                         | 2   | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7   | 8       | 9              | 10             | 11             | 12           | 11=(11-12)              |
| <b>2.</b>                 | <b>Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>                         |                    |                   |         |         |   |         |                |                |                |              |                         |
| <b>2.11.</b>              | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>  |                    |                   |         |         |   |         |                |                |                |              |                         |
| 2.11.01.2.<br>06.0009.    | Penyelenggara<br>an Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi<br>SKPD                               |                    |                   |         |         | Jumlah<br>Laporan<br>Penyelenggara<br>an Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD   | -       | 450<br>Laporan | -              | 103.366.400,-  | -            | -                       |
| <b>2.11.01.2.<br/>07.</b> | <b>Pengadaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b> |                    |                   |         |         | Tersedianya<br>meubelair<br>untuk sarana<br>kantor  | -       | 2 Unit         | -              | 59.782.000,-   | -            | -                       |
| 2.11.01.2.<br>07.0005.    | Pengadaan<br>Mebel  |                    |                   |         |         | Jumlah Paket<br>Mebel yang<br>Disediakan  | -       | 2 Unit         | <b>59 Unit</b> | 59.782.000,-   | 73.447.000,- | 13.665.000,-            |
| <b>2.11.01.2.<br/>08.</b> | <b>Penyediaan<br/>Jasa<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                 |                    |                   |         |         | Berita Acara<br>Reviu Internal<br>SKPD<br>terhadap<br>capaian<br>kinerja Sub<br>Kegiatan<br>pada<br>Kegiatan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan | -       | 1 BA           | -              | 179.998.000,-  | -            | -                       |

| No.                    | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan          | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan  |         |              |         | Pagu Indikatif |               | Bertambah/<br>Berkurang |
|------------------------|---|--------------------|-------------------|---------|---------|---|---------|--------------|---------|----------------|---------------|-------------------------|
|                        |   |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur  |         | Target       |         | Sebelum        | Sesudah       |                         |
|                        |   |                    |                   |         |         | Sebelum   | Sesudah | Sebelum      | Sesudah |                |               |                         |
| 1                      | 2   | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7   | 8       | 9            | 10      | 11             | 12            | 11=(11-12)              |
| 2.                     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar                        |                    |                   |         |         |   |         |              |         |                |               |                         |
| 2.11.                  | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup   |                    |                   |         |         |   |         |              |         |                |               |                         |
|                        |   |                    |                   |         |         | Pemerintahan Daerah   |         |              |         |                |               |                         |
| 2.11.01.2.<br>08.0002. | Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik                     |                    |                   |         |         | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan  | -       | 3<br>Laporan | -       | 179.998.000,-  | 228.952.900,- | 48.954.900,-            |
| 2.11.01.2.<br>09.      | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah |                    |                   |         |         | Berita Acara<br>Reviu Internal<br>SKPD<br>terhadap<br>capaian<br>kinerja Sub<br>Kegiatan<br>pada<br>Kegiatan<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -       | 1 BA         | -       | 304.890.500,-  | -             | -                       |
| 2.11.01.2.<br>09.0001. | Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya  |                    |                   |         |         | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau   | -       | 23 Unit      | -       | 51.160.000,-   | -             | -                       |

| No.                    | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan  | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan  |         |          |         | Pagu Indikatif |              | Bertambah/<br>Berkurang |
|------------------------|---|--------------------|-------------------|---------|---------|---|---------|----------|---------|----------------|--------------|-------------------------|
|                        |   |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur  |         | Target   |         | Sebelum        | Sesudah      |                         |
|                        |   |                    |                   |         |         | Sebelum   | Sesudah | Sebelum  | Sesudah |                |              |                         |
| 1                      | 2   | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7   | 8       | 9        | 10      | 11             | 12           | 11=(11-12)              |
| 2.                     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar  |                    |                   |         |         |   |         |          |         |                |              |                         |
| 2.11.                  | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup   |                    |                   |         |         |   |         |          |         |                |              |                         |
|                        | Pemeliharaan,<br>dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan   |                    |                   |         |         | Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya   |         |          |         |                |              |                         |
| 2.11.01.2.<br>09.0002. | Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak dan<br>Perizinan<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau Lapangan |                    |                   |         |         | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | -       | 159 Unit | -       | 74.046.500,-   | 50.593.400,- | (23.453.100)            |
| 2.11.01.2.<br>09.0006. | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya  |                    |                   |         |         | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara  | -       | 119 Unit | -       | 87.850.000,-   | -            | -                       |
| 2.11.01.2.<br>09.0009. | Pemeliharaan/R<br>ehabilitasi<br>Gedung Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya   |                    |                   |         |         | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi   | -       | 6 Unit   | -       | 91.834.000,-   | -            | -                       |

| No.                | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan  |         |           |         | Pagu Indikatif |         | Bertambah/<br>Berkurang |
|--------------------|--|--------------------|-------------------|---------|---------|---|---------|-----------|---------|----------------|---------|-------------------------|
|                    |  |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur  |         | Target    |         | Sebelum        | Sesudah |                         |
|                    |  |                    |                   |         |         | Sebelum   | Sesudah | Sebelum   | Sesudah |                |         |                         |
| 1                  | 2  | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7   | 8       | 9         | 10      | 11             | 12      | 11=(11-12)              |
| 2.                 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar                             |                    |                   |         |         |   |         |           |         |                |         |                         |
| 2.11.              | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup  |                    |                   |         |         |   |         |           |         |                |         |                         |
| 2.11.02.           | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP   |                    |                   |         |         |   |         |           |         |                |         |                         |
|                    |  |                    |                   |         |         | Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup (Kumulatif)  |         | 4 Poin    | -       | 157.618.800,-  | -       | -                       |
| 2.11.02.2.01.      | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota                 |                    |                   |         |         | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | -       | 1 BA      | -       | 157.618.800,-  | -       | -                       |
| 2.11.02.2.01.0003. | Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota   |                    |                   |         |         | Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan  | -       | 4 Dokumen | -       | 157.618.800,-  | -       | -                       |

| No.           | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan                                     |         |           |         | Pagu Indikatif |         | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------------|--|--------------------|-------------------|---------|---------|--|---------|-----------|---------|----------------|---------|-------------------------|
|               |  |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur   |         | Target    |         | Sebelum        | Sesudah |                         |
|               |  |                    |                   |         |         | Sebelum  | Sesudah | Sebelum   | Sesudah |                |         |                         |
| 1             | 2  | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7  | 8       | 9         | 10      | 11             | 12      | 11=(11-12)              |
| 2.            | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar               |                    |                   |         |         |  |         |           |         |                |         |                         |
| 2.11.         | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup                                    |                    |                   |         |         |  |         |           |         |                |         |                         |
| 2.11.03.      | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP            |                    |                   |         |         |  |         |           |         |                |         |                         |
|               |  |                    |                   |         |         | Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu (Non Kumulatif)   | -       | 81 Poin   | -       | -              | -       | -                       |
|               |  |                    |                   |         |         | Persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu (Non Kumulatif) | -       | 100%      | -       | -              | -       | -                       |
|               |  |                    |                   |         |         | Luasan Tutupan Lahan (M2) (Kumulatif)  | -       | 181,56 M2 | -       | -              | -       | -                       |
| 2.11.03.2.01. | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot        |                    |                   |         |         | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan             | -       | 1 BA      | -       | 369.973.400,-  | -       | -                       |

| No.                    | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan   |         |            |         | Pagu Indikatif |               | Bertambah/<br>Berkurang |
|------------------------|--|--------------------|-------------------|---------|---------|--|---------|------------|---------|----------------|---------------|-------------------------|
|                        |  |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur   |         | Target     |         | Sebelum        | Sesudah       |                         |
|                        |  |                    |                   |         |         | Sebelum  | Sesudah | Sebelum    | Sesudah |                |               |                         |
| 1                      | 2  | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7  | 8       | 9          | 10      | 11             | 12            | 11=(11-12)              |
| 2.                     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar               |                    |                   |         |         |  |         |            |         |                |               |                         |
| 2.11.                  | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup                                    |                    |                   |         |         |  |         |            |         |                |               |                         |
|                        | a  |                    |                   |         |         | pada<br>Kegiatan<br>Pencegahan<br>Pencemaran<br>dan/atau<br>Kerusakan<br>Lingkungan<br>Hidup<br>Kabupaten/Ko<br>ta   |         |            |         |                |               |                         |
|                        |  |                    |                   |         |         | Berita Acara<br>Reviu Internal<br>SKPD<br>terhadap<br>capaian<br>kinerja Sub<br>Kegiatan<br>pada<br>Kegiatan<br>Penanggulan<br>gan<br>Pencemaran<br>dan/atau<br>Kerusakan<br>Lingkungan<br>Hidup<br>Kabupaten/Ko<br>ta | -       | 1 BA       | -       | -              | -             | -                       |
| 2.11.03.2<br>.01.0001. | Koordinasi,<br>Sinkronisasi,   |                    |                   |         |         | Jumlah<br>Dokumen  | -       | 2<br>Dokum | -       | 250.000.000,-  | 450.000.000,- | 200.000.000-            |



| No.                | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan                      | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan   |         |           |         | Pagu Indikatif |         | Bertambah/<br>Berkurang |
|--------------------|---|--------------------|-------------------|---------|---------|--|---------|-----------|---------|----------------|---------|-------------------------|
|                    |   |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur   |         | Target    |         | Sebelum        | Sesudah |                         |
|                    |   |                    |                   |         |         | Sebelum  | Sesudah | Sebelum   | Sesudah |                |         |                         |
| 1                  | 2   | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7  | 8       | 9         | 10      | 11             | 12      | 11=(11-12)              |
| 2.                 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar  |                    |                   |         |         |  |         |           |         |                |         |                         |
| 2.11.              | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup   |                    |                   |         |         |  |         |           |         |                |         |                         |
|                    | dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut    |                    |                   |         |         | Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut  |         | en        |         |                |         |                         |
| 2.11.03.2.01.0002. | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim |                    |                   |         |         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan |         | 3 Dokumen | -       | 119.973.400,-  | -       | -                       |
| 2.11.03.2.03.      | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  |                    |                   |         |         | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub  | -       | 1 BA      | -       | 208.456.700,-  | -       | -                       |

| No.                    | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan   |         |            |         | Pagu Indikatif         |                        | Bertambah/<br>Berkurang |
|------------------------|--|--------------------|-------------------|---------|---------|--|---------|------------|---------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                        |  |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur   |         | Target     |         | Sebelum                | Sesudah                |                         |
|                        |  |                    |                   |         |         | Sebelum  | Sesudah | Sebelum    | Sesudah |                        |                        |                         |
| 1                      | 2  | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7  | 8       | 9          | 10      | 11                     | 12                     | 11=(11-12)              |
| 2.                     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar               |                    |                   |         |         |  |         |            |         |                        |                        |                         |
| 2.11.                  | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup                                    |                    |                   |         |         |  |         |            |         |                        |                        |                         |
|                        | Kabupaten/Kota   |                    |                   |         |         | Kegiatan pada Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |         |            |         |                        |                        |                         |
| 2.11.03.2.<br>03.0013. | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi                                       |                    |                   |         |         | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan   | -       | 1 Kegiatan | -       | 208.456.700,-          | -                      | -                       |
| <b>2.11.04.</b>        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                      |                    |                   |         |         |  |         |            |         | <b>2.715.887.900,-</b> | <b>3.069.072.000,-</b> | <b>353.184.100,-</b>    |
|                        |  |                    |                   |         |         | Meningkatnya keanekaragaman hayati (Kumulatif)   | -       | 181,56 M2  |         |                        |                        |                         |
| 2.11.04.2.<br>01.      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                               |                    |                   |         |         | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian  | -       | 1 BA       | -       | 2.715.887.900,-        | -                      | -                       |

| No.                    | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan          | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan  |         |              |         | Pagu Indikatif  |                 | Bertambah/<br>Berkurang |
|------------------------|---|--------------------|-------------------|---------|---------|---|---------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                        |   |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur  |         | Target       |         | Sebelum         | Sesudah         |                         |
|                        |   |                    |                   |         |         | Sebelum   | Sesudah | Sebelum      | Sesudah |                 |                 |                         |
| 1                      | 2   | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7   | 8       | 9            | 10      | 11              | 12              | 11=(11-12)              |
| 2.                     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar                                      |                    |                   |         |         |   |         |              |         |                 |                 |                         |
| 2.11.                  | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup   |                    |                   |         |         |   |         |              |         |                 |                 |                         |
|                        |   |                    |                   |         |         | kinerja Sub<br>Kegiatan<br>pada<br>Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Keanekaraga<br>man Hayati<br>Kabupaten/Ko<br>ta |         |              |         |                 |                 |                         |
| 2.11.04.2.<br>01.0001. | Penyusunan<br>dan Penetapan<br>Rencana<br>Pengelolaan<br>Keanekaragama<br>n Hayati                    |                    |                   |         |         | Jumlah<br>Dokumen<br>Rencana<br>Induk<br>Pengelolaan<br>Kehati yang<br>Disusun                                | -       | 3<br>Dokumen | -       | 100.076.800,-   | -               | -                       |
| 2.11.04.2.<br>01.0004. | Pengelolaan<br>Ruang Terbuka<br>Hijau (RTH)   |                    |                   |         |         | Luas RTH<br>yang Dikelola<br>Lingkup<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Ko<br>ta                                      | -       | 22 Ha        | -       | 2.495.149.600,- | 3.148.333.700,- | 653.184.100,-           |
| 2.11.04.2.<br>01.0006. | Pengembangan<br>Kapasitas<br>Kelembagaan<br>dan SDM dalam<br>Pengelolaan<br>Keanekaragama<br>n Hayati |                    |                   |         |         | Jumlah Orang<br>yang<br>Meningkat<br>Kapasitasnya<br>dalam<br>Pengelolaan<br>Keanekaraga<br>man Hayati        | -       | 100<br>Orang | -       | 120.661.500,-   | -               | -                       |

| No.           | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan   | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan   |         |           |         | Pagu Indikatif |         | Bertambah/<br>Berkurang |
|---------------|--|--------------------|-------------------|---------|---------|--|---------|-----------|---------|----------------|---------|-------------------------|
|               |  |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur   |         | Target    |         | Sebelum        | Sesudah |                         |
|               |  |                    |                   |         |         | Sebelum  | Sesudah | Sebelum   | Sesudah |                |         |                         |
| 1             | 2  | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7  | 8       | 9         | 10      | 11             | 12      | 11=(11-12)              |
| 2.            | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar   |                    |                   |         |         |  |         |           |         |                |         |                         |
| 2.11.         | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup  |                    |                   |         |         |  |         |           |         |                |         |                         |
| 2.11.06.      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                        |                    |                   |         |         |  |         |           |         |                |         |                         |
|               |  |                    |                   |         |         | Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan (Kumulatif)   | -       | 250 Usaha | -       | -              | -       | -                       |
| 2.11.06.2.01. | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                    |                   |         |         | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin | -       | 1 BA      | -       | 351.248.100,-  | -       | -                       |

| No.                    | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan   | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan   |         |                       |         | Pagu Indikatif |         | Bertambah/<br>Berkurang |
|------------------------|--|--------------------|-------------------|---------|---------|--|---------|-----------------------|---------|----------------|---------|-------------------------|
|                        |  |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur   |         | Target                |         | Sebelum        | Sesudah |                         |
|                        |  |                    |                   |         |         | Sebelum  | Sesudah | Sebelum               | Sesudah |                |         |                         |
| 1                      | 2  | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7  | 8       | 9                     | 10      | 11             | 12      | 11=(11-12)              |
| 2.                     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar   |                    |                   |         |         |  |         |                       |         |                |         |                         |
| 2.11.                  | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup  |                    |                   |         |         |  |         |                       |         |                |         |                         |
|                        |  |                    |                   |         |         | PPLH<br>diterbitkan<br>oleh<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/Ko<br>ta  |         |                       |         |                |         |                         |
| 2.11.06.2.<br>01.0001. | Fasilitasi<br>Pemenuhan<br>Ketentuan dan<br>Kewajiban Izin<br>Lingkungan<br>dan/atau Izin<br>PPLH  |                    |                   |         |         | Jumlah<br>Rekomendasi<br>dan/atau<br>Persetujuan<br>Teknis,<br>Persetujuan<br>Lingkungan,<br>dan Surat<br>Kelayakan<br>Operasi yang<br>Diberikan | -       | 60<br>Dokumen         | -       | 151.248.100,-  | -       | -                       |
| 2.11.06.2.<br>01.0005. | Pengawasan<br>Perizinan<br>Berusaha atau<br>Persetujuan<br>Pemerintah<br>terkait<br>Persetujuan<br>Lingkungan<br>yang diterbitkan<br>oleh Pemerintah<br>Daerah Provinsi<br>dan Peraturan<br>Perundang- |                    |                   |         |         | Jumlah<br>Badan usaha<br>dan/atau<br>kegiatan yang<br>diawasi  | -       | 250<br>Badan<br>Usaha | -       | 200.000.000,-  | -       | -                       |

| No.               | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan                             | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan   |         |         |         | Pagu Indikatif |         | Bertambah/<br>Berkurang |
|-------------------|--|--------------------|-------------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|
|                   |  |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur   |         | Target  |         | Sebelum        | Sesudah |                         |
|                   |  |                    |                   |         |         | Sebelum  | Sesudah | Sebelum | Sesudah |                |         |                         |
| 1                 | 2  | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7  | 8       | 9       | 10      | 11             | 12      | 11=(11-12)              |
| 2.                | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar   |                    |                   |         |         |  |         |         |         |                |         |                         |
| 2.11.             | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup  |                    |                   |         |         |  |         |         |         |                |         |                         |
|                   | undangan di<br>bidang<br>Perlindungan<br>dan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan<br>Hidup                                       |                    |                   |         |         |  |         |         |         |                |         |                         |
| 2.11.08.          | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                        |                    |                   |         |         |  |         |         |         | 529.225.900,-  | -       | -                       |
|                   |  |                    |                   |         |         | Meningkatnya<br>partisipasi<br>masyarakat/le<br>mbaga<br>masyarakat/d<br>unia<br>usaha/dunia<br>pendidikan<br>dalam<br>perlindungan<br>dan<br>pengelolaan<br>lingkungan<br>(Kumulatif) |         | 11 Poin | -       | -              | -       | -                       |
| 2.11.08.2.<br>01. | Penyelenggara<br>an Pendidikan,<br>Pelatihan, dan<br>Penyuluhan<br>Lingkungan<br>Hidup untuk<br>Lembaga<br>Kemasyarakata |                    |                   |         |         | Berita Acara<br>Reviu Internal<br>SKPD<br>terhadap<br>capaian<br>kinerja Sub<br>Kegiatan<br>pada   | -       | 1 BA    | -       | 529.225.900,-  | -       | -                       |

| No.                    | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan   |         |              |         | Pagu Indikatif |         | Bertambah/<br>Berkurang |
|------------------------|--|--------------------|-------------------|---------|---------|--|---------|--------------|---------|----------------|---------|-------------------------|
|                        |  |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur   |         | Target       |         | Sebelum        | Sesudah |                         |
|                        |  |                    |                   |         |         | Sebelum  | Sesudah | Sebelum      | Sesudah |                |         |                         |
| 1                      | 2  | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7  | 8       | 9            | 10      | 11             | 12      | 11=(11-12)              |
| 2.                     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar               |                    |                   |         |         |  |         |              |         |                |         |                         |
| 2.11.                  | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup                                    |                    |                   |         |         |  |         |              |         |                |         |                         |
|                        | n Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota  |                    |                   |         |         | Kegiatan<br>Penyelenggaraan<br>Pendidikan,<br>Pelatihan,<br>dan<br>Penyuluhan<br>Lingkungan<br>Hidup untuk<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |         |              |         |                |         |                         |
| 2.11.08.2.<br>01.0002. | Pendampingan<br>Gerakan Peduli<br>Lingkungan<br>Hidup                          |                    |                   |         |         | Jumlah<br>Pendampingan<br>Pembinaan<br>Gerakan<br>Peduli dan<br>Berbudaya<br>Lingkungan<br>Hidup yang<br>Dilaksanakan  | -       | 1<br>Dokumen | -       | 529.225.900,-  | -       | -                       |
| 2.11.09.               | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                   |                    |                   |         |         |  |         |              |         |                |         |                         |
|                        |  |                    | -                 | -       |         | Meningkatnya<br>partisipasi<br>masyarakat/lembaga<br>masyarakat/dunia  | -       | 5 Poin       | -       | 119.270.100,-  | -       | -                       |

| No.                    | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan             | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan  |         |           |         | Pagu Indikatif |         | Bertambah/<br>Berkurang |
|------------------------|--|--------------------|-------------------|---------|---------|---|---------|-----------|---------|----------------|---------|-------------------------|
|                        |  |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur  |         | Target    |         | Sebelum        | Sesudah |                         |
|                        |  |                    |                   |         |         | Sebelum   | Sesudah | Sebelum   | Sesudah |                |         |                         |
| 1                      | 2  | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7   | 8       | 9         | 10      | 11             | 12      | 11=(11-12)              |
| 2.                     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar   |                    |                   |         |         |   |         |           |         |                |         |                         |
| 2.11.                  | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup  |                    |                   |         |         |   |         |           |         |                |         |                         |
|                        |  |                    |                   |         |         | usaha/dunia<br>pendidikan<br>dalam<br>perlindungan<br>dan<br>pengelolaan<br>lingkungan<br>(Kumulatif)   |         |           |         |                |         |                         |
| 2.11.09.2.<br>01.      | Pemberian<br>Penghargaan<br>Lingkungan<br>Hidup Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                      |                    |                   |         |         | Berita Acara<br>Reviu Internal<br>SKPD<br>terhadap<br>capaian<br>kinerja Sub<br>Kegiatan<br>pada<br>Kegiatan<br>Pemberian<br>Penghargaan<br>Lingkungan<br>Hidup Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | -       | 1 BA      | -       | 119.270.100,-  | -       | -                       |
| 2.11.09.2.<br>01.0001. | Penilaian<br>Kinerja<br>Masyarakat/Lem-<br>baga<br>Masyarakat/Dun-<br>ia Usaha/Dunia<br>Pendidikan/Filan |                    |                   |         |         | Jumlah<br>Masyarakat/L-<br>embaga<br>Masyarakat/D-<br>unia<br>Usaha/Dunia<br>Pendidikan/Fil   | -       | 5 Entitas | -       | 119.270.100,-  | -       | -                       |



| No.               | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan  | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan   |         |         |         | Pagu Indikatif |               | Bertambah/<br>Berkurang |   |
|-------------------|---|--------------------|-------------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|----------------|---------------|-------------------------|---|
|                   |   |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur   |         | Target  |         | Sebelum        | Sesudah       |                         |   |
|                   |   |                    |                   |         |         | Sebelum  | Sesudah | Sebelum | Sesudah |                |               |                         |   |
| 1                 | 2   | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7  | 8       | 9       | 10      | 11             | 12            | 11=(11-12)              |   |
| 2.                | <b>Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>   |                    |                   |         |         |  |         |         |         |                |               |                         |   |
| 2.11.             | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>  |                    |                   |         |         |  |         |         |         |                |               |                         |   |
|                   | tropi dalam<br>Perlindungan<br>dan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan<br>Hidup  |                    |                   |         |         | antropi yang<br>Dinilai<br>Kinerjanya<br>dalam rangka<br>PPLH  |         |         |         |                |               |                         |   |
| 2.11.10.          | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  |                    |                   |         |         |  |         |         |         |                | 120.000.000,- | -                       | - |
|                   |   |                    | -                 | -       |         | Meningkatnya<br>pelayanan<br>penanganan<br>pengaduan<br>masyarakat<br>(Non<br>Kumulatif)   | -       | 100%    | -       |                |               |                         |   |
| 2.11.10.2.<br>01. | <b>Penyelesaian<br/>Pengaduan<br/>Masyarakat di<br/>Bidang<br/>Perlindungan<br/>dan<br/>Pengelolaan<br/>Lingkungan<br/>Hidup (PPLH)<br/>Kabupaten/Kot<br/>a</b> |                    | -                 | -       |         | Berita Acara<br>Reviu Internal<br>SKPD<br>terhadap<br>capaian<br>kinerja Sub<br>Kegiatan<br>pada<br>Kegiatan<br>Penyelesaian<br>Pengaduan<br>Masyarakat di<br>Bidang<br>Perlindungan<br>dan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan | -       | 1 BA    | -       | 120.000.000,-  |               |                         |   |

| No.                    | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan   |         |               |         | Pagu Indikatif        |                         | Bertambah/<br>Berkurang |
|------------------------|--|--------------------|-------------------|---------|---------|--|---------|---------------|---------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |  |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur   |         | Target        |         | Sebelum               | Sesudah                 |                         |
|                        |  |                    |                   |         |         | Sebelum  | Sesudah | Sebelum       | Sesudah |                       |                         |                         |
| 1                      | 2  | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7  | 8       | 9             | 10      | 11                    | 12                      | 11=(11-12)              |
| 2.                     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar                             |                    |                   |         |         |  |         |               |         |                       |                         |                         |
| 2.11.                  | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup  |                    |                   |         |         |  |         |               |         |                       |                         |                         |
|                        |  |                    |                   |         |         | Hidup (PPLH)<br>Kabupaten/Ko<br>ta   |         |               |         |                       |                         |                         |
| 2.11.10.2.<br>01.0006. | Penerapan<br>sanksi<br>administrasi<br>yang menjadi<br>kewenangan<br>kabupaten/kota          |                    |                   |         |         | Jumlah<br>penerapan<br>sanksi<br>administratif<br>yang<br>dikenakan<br>kepada<br>penanggung<br>jawab<br>usaha/kegiata<br>n yang tidak<br>taat dan<br>menjadi<br>kewenangan<br>kabupaten/kot<br>a | -       | 12<br>Perkara | -       | 120.000.000,-         | -                       | -                       |
| <b>2.11.11.</b>        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>   |                    |                   |         |         |  |         |               |         | <b>36.003.785.000</b> | <b>36.529.843.900,-</b> | <b>526.058.900,-</b>    |
|                        |  |                    |                   |         |         | Prosentase<br>Cakupan<br>Pelayanan<br>pengelolaan<br>sampah (Non<br>Kumulatif)   | -       | 70%           | -       | -                     | -                       | -                       |
|                        |  |                    |                   |         |         | Prosentase<br>Timbulan<br>Sampah yang<br>Terkurangi<br>(Non  | -       | 20%           | -       | -                     | -                       | -                       |

| No.                    | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan  |         |                    |         | Pagu Indikatif  |                 | Bertambah/<br>Berkurang |
|------------------------|--|--------------------|-------------------|---------|---------|---|---------|--------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                        |  |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur  |         | Target             |         | Sebelum         | Sesudah         |                         |
|                        |  |                    |                   |         |         | Sebelum   | Sesudah | Sebelum            | Sesudah |                 |                 |                         |
| 1                      | 2  | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7   | 8       | 9                  | 10      | 11              | 12              | 11=(11-12)              |
| 2.                     | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar                             |                    |                   |         |         |   |         |                    |         |                 |                 |                         |
| 2.11.                  | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup  |                    |                   |         |         |   |         |                    |         |                 |                 |                         |
| 2.11.11.2.<br>01.      | Pengelolaan<br>Sampah  |                    |                   |         |         | Kumulatif)<br>Berita Acara<br>Reviu Internal<br>SKPD<br>terhadap<br>capaian<br>kinerja Sub<br>Kegiatan<br>pada<br>Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Sampah                           | -       | 1 BA               | -       | 36.003.785.000  | -               | -                       |
| 2.11.11.2.<br>01.0004. | Peningkatan<br>Peran Serta<br>Masyarakat<br>dalam<br>Pengelolaan<br>Persampahan              |                    |                   |         |         | Jumlah<br>Masyarakat,<br>Kelompok<br>Masyarakat<br>atau Para<br>Pihak Lainnya<br>yang Terlibat<br>Aktif dalam<br>Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Sampah<br>Berkbasis<br>Masyarakat | -       | 50<br>Kelompo<br>k | -       | 5.592.067.300,- | 5.710.882.300,- | 118.815.000,-           |
| 2.11.11.2.<br>01.0005. | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penyediaan<br>Prasarana dan<br>Sarana<br>Pengelolaan       |                    |                   |         |         | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi<br>dan<br>Sinkronisasi   | -       | 1<br>Dokumen       | -       | 4.774.615.100,- | 5.736.323.100,- | 961.708.000,-           |

| No.                | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan   |         |             |         | Pagu Indikatif   |                  | Bertambah/<br>Berkurang |
|--------------------|--|--------------------|-------------------|---------|---------|--|---------|-------------|---------|------------------|------------------|-------------------------|
|                    |  |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur   |         | Target      |         | Sebelum          | Sesudah          |                         |
|                    |  |                    |                   |         |         | Sebelum  | Sesudah | Sebelum     | Sesudah |                  |                  |                         |
| 1                  | 2  | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7  | 8       | 9           | 10      | 11               | 12               | 11=(11-12)              |
| 2.                 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar                             |                    |                   |         |         |  |         |             |         |                  |                  |                         |
| 2.11.              | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup  |                    |                   |         |         |  |         |             |         |                  |                  |                         |
|                    | Persampahan  |                    |                   |         |         | Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada |         |             |         |                  |                  |                         |
| 2.11.11.2.01.0017. | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan   |                    |                   |         |         | Jumlah sampah yang tertangani melalui  | -       | 182.500 Ton | -       | 25.637.102.600,- | 24.423.447.900,- | (1.213.654.700)         |

| No.   | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan   | Proritas<br>Daerah | Sasaran<br>Daerah | Lokasi  |         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan  |         |         |         | Pagu Indikatif |         | Bertambah/<br>Berkurang |
|-------|--|--------------------|-------------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|
|       |  |                    |                   | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur  |         | Target  |         | Sebelum        | Sesudah |                         |
|       |  |                    |                   |         |         | Sebelum   | Sesudah | Sebelum | Sesudah |                |         |                         |
| 1     | 2  | 3                  | 4                 | 5       | 6       | 7   | 8       | 9       | 10      | 11             | 12      | 11=(11-12)              |
| 2.    | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar   |                    |                   |         |         |   |         |         |         |                |         |                         |
| 2.11. | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup  |                    |                   |         |         |   |         |         |         |                |         |                         |
|       | sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan |                    |                   |         |         | proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan |         |         |         |                |         |                         |

## 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup berasal data serapan Aspirasi Masyarakat (Asmas). Asmas ini berasal dari 3 (tiga) jenis sumber yaitu Reses Dewan, Usulan Langsung dan Rembuk RW.

Pada tahun 2024 DLH mengelola anggaran yang berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon sejumlah **Rp1.993.020.000,-** dan yang berasal dari Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) sejumlah **3.401.221.000,-**.

Berikut rekapitulasi hasil Asmas melalui pelaksanaan Musrembang Kecamatan dan Reses Dewan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024:

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2024





















































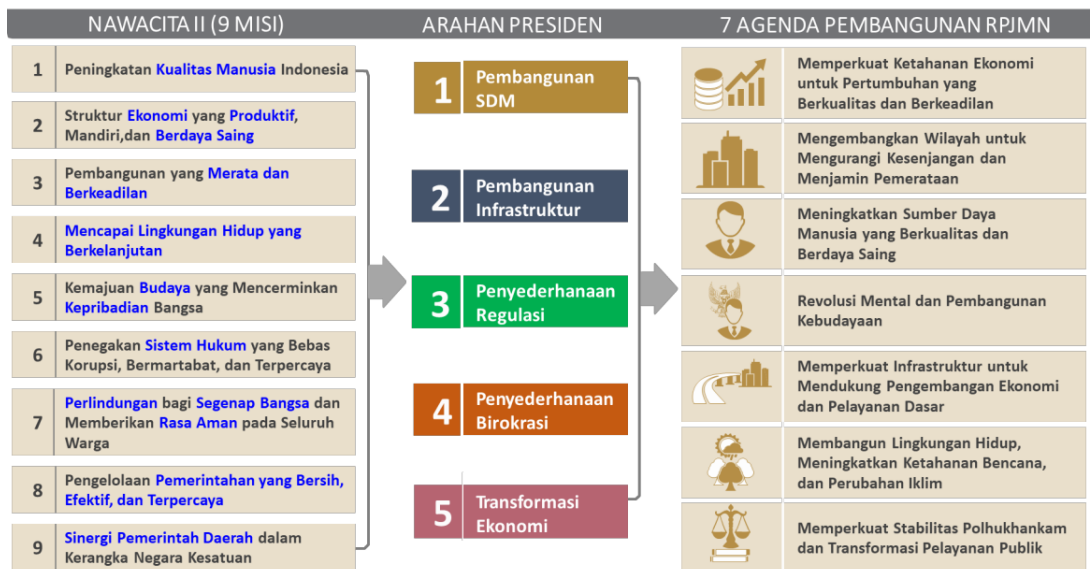


## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

#### 3.1.1. Rencana Kerja Pemerintah (Rkp) Tahun 2025

Tujuan dan sasaran Renstra Kementerian LHK mengacu kepada visi Pembangunan Nasional sebagaimana dalam RPJMN 2020-2024 yakni: **“Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang sejahtera, Adil, dan bekersistambungan dengan visi “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Dalam mencapai visi pembangunan di atas, ditetapkan 9 misi yang pembangunan (Nawacita), 5 (lima) arahan presiden dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yaitu:



Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mengemban Prioritas Nasional ke Enam PN-6 yaitu **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim** yang terdiri dari 3 Program Prioritas (PP) yaitu:

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,

maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan dan sasaran strategis dari Kementerian LHK ini memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis Dinas LH Provinsi, utamanya tujuan dan sasaran strategis **ke-satu** yaitu menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim, dengan **sasaran** Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat. Indikator kinerja untuk tujuan dan sasaran strategis ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana secara nasional IKLH ini berada pada kisaran 66,5-68,6.

Sasaran pada Kementerian LHK yang terkait dengan sasaran Dinas LH adalah:

- Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- Meningkatnya penanganan perubahan iklim baik kegiatan mitigasi tercermin dengan menurunnya emisi GRK di lima sektor prioritas dengan persentase penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan, gambut dan limbah ;
- Mengarusutamakan keanekaragaman hayati (KEHATI) pada kegiatan perencanaan pembangunan nasional;
- Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dimana salah satu targetnya adalah jumlah sampah yang dikelola.

### **3.1.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (Tpb/SDGs)**

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.



Gambar 3.1  
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon memiliki keterkaitan erat terhadap 5 (lima) tujuan dari 17 Tujuan TPB/SDGs. Lima tujuan tersebut yaitu:

- Goals 6 – Air Bersih dan Sanitasi Layak
- Goals 9 – Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
- Goals 11 – Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan;
- Goals 12 – Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
- Goals 13 – Penanganan perubahan iklim;
- Goals 15 – Ekosistem Daratan.

### 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja DLH Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 merujuk kepada rancangan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang mendukung tercapainya salah satu tujuan RPD 2024-2026 yaitu “Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan” dengan sasaran “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat”.

Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dirumuskan sebagaimana terdapat dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon  
Tahun 2019-2024

| No  | Tujuan                                 | Sasaran                             | Indikator Tujuan/Sasaran         | Penjelasan Indikator Kinerja Utama  | Kondisi Awal | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Target 2024 | Target Akhir Renstra |
|-----|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1   | 2                                      | 3                                   | 4                                | 5   | 6            | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12                   |
| 1.  | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup |                                     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKU 30%) + (ITL 40%)   |              | 50,81       | 51,04       | 51,26       | 51,49       | 57,35       | 51,71                |
| 1.1 |  | Meningkatnya kualitas air dan udara | Indeks Pencemaran Air            | Nilai maksimum dari parameter kualitas air + Nilai rata-rata dari parameter kualitas air dibagi 2     |              | 48,54       | 48,78       | 49,02       | 49,26       | 53,70       | 49,50                |
|     |  |                                     | Indeks Pencemaran Udara          | Nilai maksimum dari parameter kualitas udara + Nilai rata-rata dari parameter kualitas udara dibagi 2 |              | 75,72       | 76,22       | 76,72       | 77,22       | 76,63       | 72,22                |
| 1.2 |  | Meningkatnya tutupan lahan          | Indeks Tutupan Lahan             | Tutupan Lahan Berhutan<br>-----<br>Luas Wilayah Kabupaten   |              | 33,83       | 33,84       | 33,85       | 33,86       | 27,96       | 33,87                |
| 2.  | Meningkatkan Pengelolaan Sampah        |                                     | Persentase Pengelolaan Sampah    |   |              | 10,50       | 22,50       | 31,74       | 60          | 80          | 80                   |

| No  | Tujuan  | Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran   | Penjelasan Indikator Kinerja Utama   | Kondisi Awal | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Target 2024 | Target Akhir Renstra |
|-----|---|---|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2.1 |   | Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah                                   | Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan                                 | Luas Area pelayanan pengelolaan sampah<br>----- x 100<br>Luas Area Kabupaten                         |              | 7,50        | 15          | 13          | 30          | 60          | 60                   |
| 2.2 |   | Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan            | Persentase Pengurangan Timbulan Sampah                                   | jumlah sampah yang tertangani (ton)<br>----- x 100<br>total jumlah timbulan sampah dikabupaten (ton) |              | 3           | 7,50        | 10          | 15          | 20          | 20                   |
| 3.  | Terwujudnya Administrasi Pelayanan dan Sarana/Prasarana Perkantoran |   | Terselenggaranya Administrasi Pelayanan dan Sarana/Prasarana Perkantoran |  |              | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100                  |
| 3.1 |   | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran | Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Baik          |  |              | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100                  |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran        | Penjelasan Indikator Kinerja Utama | Kondisi Awal | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Target 2024 | Target Akhir Renstra |
|----|--------|---------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|    |        |         | Disiplinya Sumber Daya Aparatur |                                    |              | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100                  |

### **3.3. Program Dan Kegiatan**

#### **3.3.1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana perubahan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 yaitu untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup dengan tetap memperhatikan upaya-upaya pencapaian prioritas daerah, pelayanan publik, inovasi daerah, pemberdayaan masyarakat, peningkatan fungsi kelembagaan Pemerintah serta Pemangku Kepentingan.

Perubahan program dan kegiatan yang ditetapkan pada perubahan, sejalan dengan Visi Kabupaten Cirebon “Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju, dan Aman” serta mendukung tercapainya Misi ke empat yaitu “Meningkatnya produktifitas Masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah daerah”.

Program, kegiatan dan subkegiatan yang digunakan pada perubahan Tahun 2024 menggunakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana terdapat di Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024.

##### **3.3.1.1. Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Terdapat perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tahun 2024. Yaitu pada Tujuan pertama “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”, Sasaran Pertama “Meningkatnya kualitas air dan udara” dan Sasaran Kedua “Meningkatnya tutupan lahan”. Sebagaimana disajikan pada tabel 3.2 di atas.

Perubahan target kinerja ini dikarenakan, target yang semula di rencanakan sudah tercapai di tahun 2023. Target yang ditetapkan di rubahan 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Berita Acara Nomor BA-13/Setppkl/Pehkt/Ren.2.4/B/04/2024 tentang Kesepakatan Rapat Kerja

teknis Ditjen PPKL Tahun 2024 mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2045 (terlampir).

### 3.3.1.2. Perubahan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan tidak mengalami perubahan. Hanya ada perubahan target kinerja pada subkegiatan yang disesuaikan dengan perubahan anggaran pada subkegiatan tersebut.

Rekapitulasi perubahan renja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Rekapitulasi Perubahan Renja 2024**

| No           | PROGRAM/<br>KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN                                    | INDIKATOR<br>KINERJA   | TARGET KINERJA 2024 |               | CATATAN<br>PERMASALAHAN   |
|--------------|---|--|---------------------|---------------|---|
|              |   |  | SEBELUM             | SESUDAH       |   |
| 1            | 2   | 3  | 4                   | 5             | 6   |
| <b>1</b>     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      |  |                     |               |   |
| <b>1.1</b>   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |  |                     |               |   |
| <b>1.1.1</b> | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | 10 Paket            | 12 Paket      | Disesuaikan dengan masa anggaran 12 bulan                                       |
| <b>1.1.2</b> | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 18 Paket            | 12 Paket      | Disesuaikan dengan masa anggaran 12 bulan                                       |
| <b>1.1.3</b> | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen           | 7.440 Dokumen | Disesuaikan dengan jumlah surat kabar yang dilanggan selama satu tahun anggaran |
| <b>1.1.4</b> | Penyediaan Bahan/Material   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | 60 Paket            | 12 Paket      | Disesuaikan dengan masa anggaran 12 bulan                                       |
| <b>1.1.5</b> | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 600 Laporan         | 60 Laporan    | Menyesuaikan rata-rata jumlah kunjungan tamu pertahun                           |
| <b>1.2</b>   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  |                     |               |   |
| <b>1.2.1</b> | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 2 Unit              | 59 Unit       | Disesuaikan dengan jumlah pengadaan   |

---

### 3.3.2. Rekapitulasi Program, Kegiatan, Dan Subkegiatan

Rancangan Renja Perubahan SKPD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, DLH melaksanakan **9 Program, 15 Kegiatan, dan 34 Subkegiatan** dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar **Rp.48.852.981.730,-**

Adapun Program/Kegiatan/Subkegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, melalui Kegiatan:
  - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, melalui Subkegiatan:
    - 1.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.2.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.2.1.2. Koordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - 1.2.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, melalui Subkegiatan:
    - 1.3.1.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 1.3.1.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 1.3.1.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 1.3.1.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 1.3.1.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 1.3.1.6. Penyediaan Bahan/Material
    - 1.3.1.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - 1.3.1.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, melalui Subkegiatan:
  - 1.4.1.1. Pengadaan Mebel
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, melalui Subkegiatan:
  - 1.5.1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, melalui Subkegiatan:
  - 1.6.1.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.6.1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.6.1.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.6.1.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, melalui Kegiatan:
  - 2.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, melalui Subkegiatan:
    - 2.1.1.1. Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan lingkungan Hidup, melalui Kegiatan:
  - 3.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, melalui Subkegiatan:
    - 3.1.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
    - 3.1.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
  - 3.2. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, melalui Subkegiatan:



- 3.2.1. Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
- 4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), melalui Kegiatan:
  - 4.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, melalui Subkegiatan:
    - 4.1.1.1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
    - 4.1.1.2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    - 4.1.1.3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh), melalui Kegiatan:
  - 5.1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melalui Subkegiatan:
    - 5.1.1.1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
    - 5.1.1.2. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, melalui Kegiatan:
  - 6.1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, melalui Subkegiatan:
    - 6.1.1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, melalui Kegiatan:
  - 7.1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, melalui Subkegiatan:

- 7.1.1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, melalui Kegiatan:
  - 8.1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, melalui Subkegiatan:
    - 8.1.1. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
- 9. Program Pengelolaan Persampahan, melalui Kegiatan:
  - 9.1. Pengelolaan Sampah, melalui Subkegiatan:
    - 9.1.1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
    - 9.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
    - 9.1.3. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

---

### **3.3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan**

Kebutuhan pendanaan Perangkat Daerah yang diusulkan adalah jumlah dana yang diperlukan untuk pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Tahunan Perangkat Daerah setelah perubahan.

Uraian rumusan rencana Perubahan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024 tersebut di atas dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Setelah Perubahan dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Cirebon

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)             | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)   |                        |                               |               | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|------|--|--|--|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |  |  | Lokasi   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2  | 3  | 4  | 5                      | 6                             | 7             | 8               | 9                                 | 10                            |
|      | <b>NON BIDANG URUSAN</b>   |  |  |                        |                               |               |                 |                                   | <b>2.550.383.000</b>          |
| 24   | 01   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan prima (Non Kumulatif)                 | Dinas Lingkungan Hidup | 100%                          | 8.277.515.830 |                 | 100 Prosen                        | 9.429.893.298                 |
|      |  |  | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif (Non Kumulatif) |                        | 100%                          |               |                 | 100%                              |                               |
|      |  |  | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang sesuai standar Pelayanan Prima (Kumulatif)              |                        | 100%                          |               |                 | 100%                              |                               |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)   | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)   |                        |                               |               | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |               |
|------|--|--|--|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|
|      |  |  | Lokasi   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |               |
|      |  |  | 1  | 2                      | 3                             | 4             |                 | 5                                 | 6                             | 7             |
|      |  | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Kebutuhan Standar Pelayanan Prima (Kumulatif) |  | 100%                   |                               |               |                 |                                   | 100%                          |               |
| 24   | 01 2 01  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang tersusun  | Dinas Lingkungan Hidup | 1 BA                          | 60.621.300    | PIS             | -                                 | 1 BA                          | 155.000.000   |
| 24   | 01 2 01 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah  | Dinas Lingkungan Hidup | 2 Dokumen                     | 40.681.400    | PIS             | -                                 | 6 Dokumen                     | 40.273.200    |
| 24   | 01 2 01 06   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dinas Lingkungan Hidup | 5 Laporan                     | 19.939.900    | PIS             | LPPD, LKPJ, LKIP, IKU, SPIP       | 5 Dokumen                     | 15.589.900    |
| 24   | 01 2 02  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah kegiatan Administrasi keuangan yang diselenggarakan   | Dinas Lingkungan Hidup | 1 BA                          | 6.723.103.030 | PIS             |                                   | 4 Kegiatan                    | 7.819.133.198 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |   |    |    |   | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)   | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|------|--|---|----|----|---|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |  |   |    |    |   |  | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      |  |   |    |    |   |  |                                    |                        |                               |             |                 |                                   |                               |
| 24   | 01   | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Dinas Lingkungan Hidup             | 45 Orang/bulan         | 6.685.151.039                 | PIS         |                 | 45 Orang                          | 7.749.488.198                 |
| 24   | 01   | 2 | 02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Dinas Lingkungan Hidup             | 10 Laporan             | 18.976.000                    | PIS         |                 | 2 Laporan                         | 37.075.000                    |
| 24   | 01   | 2 | 02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Dinas Lingkungan Hidup             | 10 Laporan             | 18.976.000                    | PIS         |                 | 2 Laporan                         | 32.570.000                    |
| 24   | 01   | 2 | 03 |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD</b>                               | <b>Jumlah kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan</b>  | <b>Dinas Lingkungan Hidup</b>      |                        |                               | <b>PIS</b>  |                 | <b>1 Kegiatan</b>                 | <b>16.641.000</b>             |
| 24   | 01   | 2 | 03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |                                    |                        | 0                             | PIS         |                 | 6 Laporan                         | 16.641.000                    |
| 24   | 01   | 2 | 05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan</b>  | <b>Dinas Lingkungan Hidup</b>      |                        |                               | <b>PIS</b>  |                 | <b>2 Kegiatan</b>                 | <b>50.276.000</b>             |
| 24   | 01   | 2 | 05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | Dinas Lingkungan Hidup             |                        | 0                             | PIS         |                 | 86 Paket                          | 0                             |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |   |    |    | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)           | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)   |                               |                               |                    | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |                      |            |
|------|--|---|----|----|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|
|      |  |   |    |    |  | Lokasi   | Target Capaian Kinerja        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana        |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                      |            |
|      |  |   |    |    |  |  |                               |                               |                    |                 |                                   |                               | 1                    | 2          |
| 24   | 01   | 2 | 05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | Dinas Lingkungan Hidup        |                               |                    | 0               | PIS                               |                               | 86 Dokumen           | 50.276.000 |
| 24   | 01   | 2 | 06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Jumlah kegiatan Administrasi Umum yang dilaksanakan</b>                         | <b>Dinas Lingkungan Hidup</b> | <b>1 BA</b>                   | <b>949.121.000</b> | <b>PIS</b>      |                                   | <b>8 kegiatan</b>             | <b>1.495.000.000</b> |            |
| 24   | 01   | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Dinas Lingkungan Hidup        | 12 Paket                      | 12.995.200         | PIS             |                                   | 6 Paket                       | 13.945.200           |            |
| 24   | 01   | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | Dinas Lingkungan Hidup        | 3 Paket                       | 229.993.400        | PIS             |                                   | 10 Paket                      | 185.938.600          |            |
| 24   | 01   | 2 | 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | Dinas Lingkungan Hidup        | 10 Paket                      | 86.157.000         | PIS             |                                   | 12 Paket                      | 89.497.800           |            |
| 24   | 01   | 2 | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | Dinas Lingkungan Hidup        | 18 Paket                      | 291.852.400        | PIS             |                                   | 20 Paket                      | 294.999.900          |            |
| 24   | 01   | 2 | 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | Dinas Lingkungan Hidup        | 5 Dokumen                     | 100.000.000        | PIS             |                                   | 12 Dokumen                    | 95.250.000           |            |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |   |    |    |   | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)              | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|------|--|---|----|----|---|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |  |   |    |    |   |   | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      |  |   |    |    |   |   |                                    |                        |                               |             |                 |                                   |                               |
| 24   | 01   | 2 | 06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material                                 | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                         | Dinas Lingkungan Hidup             | 60 Paket               | 84.756.600                    | PIS         |                 | 60 Paket                          | 85.780.900                    |
| 24   | 01   | 2 | 06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                 | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                            | Dinas Lingkungan Hidup             | 600 Laporan            | 40.000.000                    | PIS         |                 | 600 Orang                         | 19.975.000                    |
| 24   | 01   | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas Lingkungan Hidup             | 450 Laporan            | 103.366.400                   | PIS         |                 | 450 Laporan                       | 99.386.000                    |
| 24   | 01   | 2 | 07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>                      | <b>Jumlah kegiatan pengadaan yang dilaksanakan</b>                  | <b>Dinas Lingkungan Hidup</b>      | <b>2 Unit</b>          | <b>59.782.000</b>             | PIS         |                 | <b>2 Kegiatan</b>                 | <b>49.972.000</b>             |
| 24   | 01   | 2 | 07 | 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                  | Dinas Lingkungan Hidup             | 2 Unit                 | 59.782.000                    | PIS         |                 | 5 Unit                            | 49.972.000                    |
| 24   | 01   | 2 | 07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan     | Dinas Lingkungan Hidup             |                        | 0                             | PIS         |                 | 2 Unit                            | 0                             |
| 24   | 01   | 2 | 08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah jasa penunjang yang tersedia</b>                          | <b>Dinas Lingkungan Hidup</b>      | <b>1 BA</b>            | <b>179.998.000</b>            | PIS         |                 | <b>3 Jasa</b>                     | <b>284.998.600</b>            |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |   |    |    | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)  | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)   |                               |                               |                    | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |                    |
|------|--|---|----|----|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|      |  |   |    |    |   | Lokasi   | Target Capaian Kinerja        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana        |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                    |
|      |  |   |    |    |   |  |                               |                               |                    |                 |                                   |                               | 1                  |
| 24   | 01   | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Dinas Lingkungan Hidup        | 3 Laporan                     | 179.998.000        | PIS             |                                   | 3 laporan                     | 284.998.600        |
| 24   | 01   | 2 | 09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Jumlah unit barang milik daerah yang terpelihara</b>  | <b>Dinas Lingkungan Hidup</b> | <b>1 BA</b>                   | <b>304.890.500</b> | <b>PIS</b>      |                                   | <b>30 Unit</b>                | <b>268.236.000</b> |
| 24   | 01   | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Dinas Lingkungan Hidup        | 23 Unit                       | 51.160.000         | PIS             |                                   | 30 Unit                       | 116.340.000        |
| 24   | 01   | 2 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Dinas Lingkungan Hidup        | 159 Unit                      | 74.046.500         | PIS             |                                   | 160 Unit                      | 46.800.000         |
| 24   | 01   | 2 | 09 | 03 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Dinas Lingkungan Hidup        | 6 Unit                        | 91.834.000         | PIS             |                                   | 4 Unit                        | 105.096.000        |
|      |  |   |    | 04 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Dinas Lingkungan Hidup        | 119 Unit                      | 87.850.000         | PIS             |                                   |                               | 0                  |



| Kode                 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output) | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)  |  |                               |               | Catatan Penting    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |                   |                    |
|----------------------|--|--|---|--|-------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
|                      |  |  | Lokasi  | Target Capaian Kinerja   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                    | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                   |                    |
|                      |  |  |   |  |                               |               |                    |                                   |                               | 1                 | 2                  |
| <b>BIDANG URUSAN</b> |  |  |   |  |                               |               |                    |                                   |                               |                   |                    |
| 2                    | 11 02  |  | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | <b>Persentase peningkatan perencanaan lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon</b>   | <b>Dinas Lingkungan Hidup</b> | <b>4 Poin</b> | <b>157.618.800</b> | <b>PIS</b>                        |                               | <b>100 %</b>      | <b>177.156.900</b> |
| 2                    | 11 02  | 2.01   | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersedia</b>                              | <b>Dinas Lingkungan Hidup</b> | <b>1 BA</b>   | <b>157.618.800</b> | <b>PIS</b>                        |                               | <b>10 Dokumen</b> | <b>177.156.900</b> |
| 2                    | 11 02  | 2.01   | 03 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota   | Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan  | Dinas Lingkungan Hidup        | 4 Dokumen     | 157.618.800        | PIS                               |                               | 2 Dokumen         | 70.000.000         |
| 2                    | 11 02  | 2.01   | 05 Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH                         | Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPK yang ditetapkan  | Dinas Lingkungan Hidup        |               | 0                  | PIS                               |                               | 3 Dokumen         | 107.156.900        |
| 2                    | 11 02  | 2.01   | 06 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota  | Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | Dinas Lingkungan Hidup        |               | 0                  | PIS                               |                               | 3 Dokumen         | 0                  |
| 2                    | 11 02  | 2.02   | <b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>      | <b>Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang tersedia</b>  | <b>Dinas Lingkungan Hidup</b> |               | <b>0</b>           | <b>PIS</b>                        |                               | <b>2 Dokumen</b>  | <b>0</b>           |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |    |      |    |   | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)   | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|------|--|----|------|----|---|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |  |    |      |    |   |  | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      |  |    |      |    |   |  |                                    |                        |                               |             |                 |                                   |                               |
| 2    | 11   | 02 | 2.02 | 02 | Pembuatan dan Pelaksanaan RPJPD/RPJMD dan KLHS Kabupaten/Kota yang Disusun                                    | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun  | Dinas Lingkungan Hidup             |                        | 0                             | PIS         |                 | 2 Dokumen                         | 0                             |
| 2    | 11   | 03 |      |    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN</b>  | 1. Persen tasejumlah titik pantau sungai yang memenuhi kriteria sedang<br>2. Persen tase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu | Dinas Lingkungan Hidup             | 100%                   | 578.430.100                   | PIS         |                 | 73%                               | 825.730.000                   |
| 2    | 11   | 03 | 2    | 01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                      | Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan  | Dinas Lingkungan Hidup             | 1 BA                   | 369.973.400                   | PIS         |                 | 6 Kegiatan                        | 371.046.500                   |
|      |  |    |      |    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan  | Dinas Lingkungan Hidup             |                        | 0                             | PIS         |                 | 1 Kegiatan                        | 0                             |
|      |  |    |      |    | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK   | Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK   | Dinas Lingkungan Hidup             |                        | 0                             | PIS         |                 | 1 Dokumen                         | 0                             |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)   | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)   |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |             |
|------|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|
|      |  |  | Lokasi   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |             |
|      |  |  |  |                        |                               |             |                 |                                   |                               | 1           |
|      |  | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut  | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) | Dinas Lingkungan Hidup |                               | 0           | PIS             |                                   | 61 Lokasi                     | 250.000.000 |
|      |  | Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan   | Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim                     | Dinas Lingkungan Hidup |                               | 0           | PIS             |                                   | 1 Laporan                     | 0           |
|      |  | Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota  | Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim  | Dinas Lingkungan Hidup |                               | 0           | PIS             |                                   | 1 Laporan                     | 121.046.500 |
|      |  | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota   | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan  | Dinas Lingkungan Hidup |                               | 0           | PIS             |                                   | 10 Dokumen                    | 0           |
| 2    | 11 03 2.01 00 01   | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut   | Dinas Lingkungan Hidup | 2 Dokumen                     | 250.000.000 | PIS             |                                   |                               | 0           |

| Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)   | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|------|----|----|------|----|---|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |      |    |   |  | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |      |    | 2   | 3  | 4                                  | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                 | 10                            |
| 2    | 11 | 03 | 2.01 | 00 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan                                 | Dinas Lingkungan Hidup             | 3 Dokumen              | 119.973.400                   | PIS         |                 |                                   | 0                             |
| 2    | 11 | 03 | 2    | 03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Dinas Lingkungan Hidup             | 1 BA                   | 208.456.700                   | PIS         |                 |                                   | 0                             |
| 2    | 11 | 03 | 2.03 | 00 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi  | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan   | Dinas Lingkungan Hidup             | 1 Kegiatan             | 208.456.700                   | PIS         |                 |                                   | 0                             |
|      |    |    |      |    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN</b>  | <b>Persentase tingkat pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>  | <b>Dinas Lingkungan Hidup</b>      |                        |                               | <b>PIS</b>  |                 | <b>33 %</b>                       | <b>454.683.500</b>            |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)   | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                        |                               |             | Catatan Penting        | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|------|--|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |  |  | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                        | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2  | 3  | 4                                  | 5                      | 6                             | 7           | 8                      | 9                                 | 10                            |
|      | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah lokasi sumber pencemaran yang tertangani  | Dinas Lingkungan Hidup             |                        | 0                             | PIS         | IPAL Komunal Batu Alam | 2 Lokasi                          | 0                             |
|      | Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                 | Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi                    | Dinas Lingkungan Hidup             |                        | 0                             | PIS         |                        | 2 Lokasi                          | 0                             |
|      | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup Kabupaten/Kota      | Luas lokasi yang dipulihkan/direhabilitasi dari pencemaran dan/atau kerusakan                  | Dinas Lingkungan Hidup             |                        |                               | PIS         |                        | 1 Kegiatan                        | 454.683.500                   |
|      | Pelaksanaan remediasi  | Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota    | Dinas Lingkungan Hidup             |                        | 0                             | PIS         |                        | 1 Ha                              | 93.872.800                    |
|      | Pelaksanaan rehabilitasi   | Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Dinas Lingkungan Hidup             |                        | 0                             | PIS         |                        | 3 Ha                              | 252.474.500                   |
|      | Pelaksanaan Restorasi  | Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota    | Dinas Lingkungan Hidup             |                        | 0                             | PIS         |                        | 1 Ha                              | 0                             |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)                                    | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)   |                        |                               |               | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |                |
|------|--|---|--|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
|      |  |   | Lokasi   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                |
|      |  |   |  |                        |                               |               |                 |                                   |                               | 1              |
|      |  | Pelaksanaan Pembersihan Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Dinas Lingkungan Hidup |                               | 0             | PIS             |                                   | 2.500 m2                      | 108.336.200    |
| 2    | 11 04  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                                 | <b>Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik</b>  | Dinas Lingkungan Hidup | 181,56 M2                     | 2.715.887.900 | PIS             |                                   | 100%                          | 13.414.498.400 |
| 2    | 11 04 2  | 01 <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>                                | <b>Jumlah Kegiatan pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dilakukan</b>                                      | Dinas Lingkungan Hidup | 1 BA                          | 2.715.887.900 | PIS             |                                   | 2 Kegiatan                    | 13.414.498.400 |
| 2    | 11 04 2.01   | 00 <b>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>   | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota   | Dinas Lingkungan Hidup | 22 Ha                         | 2.495.149.600 | PIS             |                                   | 461 Ha                        | 13.414.498.400 |
|      |  | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan                             | Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Dinas Lingkungan Hidup |                               | 0             | PIS             |                                   | 1 Unit                        | 0              |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)   | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|------|--|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |  |  | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2  | 3  | 4                                  | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                 | 10                            |
|      | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN | Persentase jumlah pelaku usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan LB3  | Dinas Lingkungan Hidup             |                        | 0                             | PIS         |                 | 22 %                              | 0                             |
|      | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah TPS LB3 yang disetujui  | Dinas Lingkungan Hidup             |                        | 0                             | PIS         |                 | 233 Perusahaan                    | 0                             |
|      | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Perizinan Terintegrasi Elektronik             | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik | Dinas Lingkungan Hidup             |                        | 0                             | PIS         |                 | 50 Dokumen                        | 0                             |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output) | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)   |   |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |             |             |
|------|--|--|--|---|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|      |  |  | Lokasi   | Target Capaian Kinerja  | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |             |             |
|      |  |  | 1  | 2   | 3                             | 4           |                 | 5                                 | 6                             | 7           | 8           |
| 2    | 11 06  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                        | Persentase Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang diterbitkan  | Dinas Lingkungan Hidup        | 250 Usaha   | 351.248.100     | PIS                               |                               | 100%        | 332.983.700 |
| 2    | 11 06  | 2 01   | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasional yang diberikan | Dinas Lingkungan Hidup        | 1 BA        | 351.248.100     | PIS                               |                               | 251 Dokumen | 332.983.700 |
| 2    | 11 06  | 2.01 00 01   | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH  | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan    | Dinas Lingkungan Hidup        | 60 Dokumen  | 151.248.100     | PIS                               |                               | 251 Dokumen | 132.983.900 |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)   | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)   |  |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |                 |             |           |    |
|------|--|--|--|--|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------|----|
|      |  |  | Lokasi   | Target Capaian Kinerja   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                 |             |           |    |
|      |  |  | 1  | 2  | 3                             | 4           |                 | 5                                 | 6                             | 7               | 8           | 9         | 10 |
|      |  |  | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dibina dan diawasi | Dinas Lingkungan Hidup        |             |                 |                                   |                               |                 |             | 425 Usaha |    |
| 2    | 11 06 2.01 00 05   | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi  | Dinas Lingkungan Hidup   | Badan Usaha                   | 200.000.000 | PIS             |                                   |                               | 300 Badan Usaha | 199.999.800 |           |    |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output) | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)  |  |   |                        | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |      |             |             |
|------|--|--|---|--|---|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|------|-------------|-------------|
|      |  |  | Lokasi  | Target Capaian Kinerja   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif   | Sumber Dana            |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |      |             |             |
|      |  |  |   |  |   |                        |                 |                                   |                               | 1    | 2           | 3           |
| 2    | 11 08  |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b> | Persentase masyarakat yang mendapat pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup  | Dinas Lingkungan Hidup  | 11 Poin                | 529.225.900     | PIS                               |                               | 15 % | 304.806.200 |             |
| 2    | 11 08  | 2  | 01  | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan Pendidikan Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilakukan          | Dinas Lingkungan Hidup | 1 BA            | 529.225.900                       | PIS                           |      | 30 Kegiatan | 304.806.200 |
| 2    | 11 08  | 2.01   | 00  | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup   | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Dinas Lingkungan Hidup | 1 Dokumen       | 529.225.900                       | PIS                           |      | 1 Dokumen   | 151.012.500 |
|      |  |  |   | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup   | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat                     | Dinas Lingkungan Hidup |                 | 0                                 | PIS                           |      | 2.200 Orang | 153.793.700 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)  | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)  |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |             |
|------|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|
|      |  |   | Lokasi  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |             |
|      |  |   |   |                        |                               |             |                 |                                   |                               | 1           |
|      |  | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat | Dinas Lingkungan Hidup |                               | 0           | PIS             |                                   | 100 Keluarga                  | 0           |
|      |  | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | Dinas Lingkungan Hidup |                               | 0           | PIS             |                                   | 50 Lembaga                    | 0           |
| 2    | 11 09  | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>  | <b>Persentase masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan yang menerima penghargaan lingkungan hidup</b>                   | Dinas Lingkungan Hidup |                               | 119.270.100 | PIS             |                                   | 7 %                           | 138.227.300 |
| 2    | 11 09 2  | 01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/kota   | Jumlah penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten   | Dinas Lingkungan Hidup | 1 BA                          | 119.270.100 | PIS             |                                   | 5 Kali                        | 138.227.300 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |    |      |    |    | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)  | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)  |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |             |
|------|--|----|------|----|----|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|
|      |  |    |      |    |    |   | Lokasi  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |             |
|      |  |    |      |    |    |   |   |                        |                               |             |                 |                                   |                               | 1           |
| 2    | 11   | 09 | 2.01 | 00 | 01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH        | Dinas Lingkungan Hidup | 5 Entitas                     | 119.270.100 | PIS             |                                   | 46 entitas                    | 138.277.300 |
| 2    | 11   | 10 |      |    |    | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | <b>Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditangani dan ditindaklanjuti</b>                                    | Dinas Lingkungan Hidup | 100%                          | 120.000.000 | PIS             |                                   | 100%                          | 292.927.300 |
|      |  |    |      |    |    | <b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>                     | <b>Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan</b>          | Dinas Lingkungan Hidup | 1 BA                          | 120.000.000 | PIS             |                                   | 10 Pengaduan                  | 292.927.300 |
|      |  |    |      |    |    | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota   | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | Dinas Lingkungan Hidup |                               | 0           | PIS             |                                   | 10 Pengaduan                  | 172.927.300 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |    |      |    |    | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)                                 | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)  |                               |                               |                       | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                        |                               |
|------|--|----|------|----|----|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |  |    |      |    |    |  | Lokasi  | Target Capaian Kinerja        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana           |                 | 8                                 | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      |  |    |      |    |    |  |   |                               |                               |                       |                 |                                   | 9                      | 10                            |
| 1    | 2  |    |      |    |    | 3  | 4   | 5                             | 6                             | 7                     | 8               | 9                                 | 10                     |                               |
| 2    | 11   | 10 | 2.01 | 00 | 06 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                   | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota | Dinas Lingkungan Hidup        | 12 Perkara                    | 120.000.000           | PIS             |                                   | 5 Perkara              | 120.000.000                   |
| 2    | 11   | 11 |      |    |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>   | <b>Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (Indikator Nasional)</b>   | <b>Dinas Lingkungan Hidup</b> |                               | <b>36.003.785.000</b> | <b>PIS</b>      |                                   | <b>12,11 %</b>         | <b>31.673.291.600</b>         |
| 2    | 11   | 11 | 2    |    | 01 | <b>Pengelolaan Sampah</b>  | <b>Jumlah timbulan sampah yang dapat ditangani</b>  | <b>Dinas Lingkungan Hidup</b> | <b>1 BA</b>                   | <b>36.003.785.000</b> | <b>PIS</b>      |                                   | <b>58220.53 Ton</b>    | <b>31.673.291.600</b>         |
| 2    | 11   | 11 | 2.01 | 00 | 04 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                       | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat          | Dinas Lingkungan Hidup        | 50 Kelompok                   | 5.592.067.300         | PIS             |                                   | 12 Kelompok            | 0                             |
|      |  |    |      |    |    | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir               | Dinas Lingkungan Hidup        |                               | 0                     | PIS             |                                   | 50 Jenis               | 5.631.625.400                 |
|      |  |    |      |    |    | Penanganan sampah melalui pengangkutan   | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan   | Dinas Lingkungan Hidup        |                               |                       | 0               | PIS                               | 40.60 Ton              | 19.657.835.200                |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)  | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)  |                        |                               |                | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |               |
|------|--|---|---|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|
|      |  |   | Lokasi  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |               |
|      |  |   |   |                        |                               |                |                 |                                   |                               | 1             |
|      |  | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah  | Persentase luas layanan pengumpulan sampah  | Dinas Lingkungan Hidup |                               | 0              | PIS             |                                   | 15 Lokasi                     | 4.542.979.200 |
| 2    | 11 11 2.01 00 05   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada | Dinas Lingkungan Hidup | 1 Dokumen                     | 4.774.615.100  |                 |                                   |                               | 0             |
| 2    | 11 11 2.01 00 17   | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional   | Dinas Lingkungan Hidup | 182.500 Ton                   | 25.637.102.600 | PIS             |                                   | 58178.01 Ton                  | 3.074.366.880 |

## BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahun kedepan yang menjadi acuan bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan. Renja ini disusun berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif sebagai bahan acuan dan penilaian serta mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Dengan Renja ini diharapkan SKPD dapat menentukan langkah/kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon akan lebih terarah.

Pada bab penutup Rencana Kerja DLH Tahun 2024 ada 3 (tiga) bahasan utama yang perlu digaris bawahi, yaitu:

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses penyusunan RENSTRA hingga asistensi dan penajaman program dan kegiatan yang telah disusun.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik merupakan kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan syarat dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan, ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan. Selain itu, sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Perencanaan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Perencanaan tersebut apabila dilaksanakan pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan keberhasilan pencapaian target. Untuk

menjamin agar program kegiatan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-targetnya, dan bagaimana pelaksanaannya oleh masing-masing bidang dan seksi. Sehingga kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat.

Rencana Kerja DLH merupakan salah satu instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman operasional agar terjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.

Pj. BUPATI CIREBON

**WAHYU MIJAYA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR